BUPATI MALANG

PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MALANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022, maka perlu membentuk Peraturan Bupati tentang Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2022.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang.
3. Bupati adalah Bupati Malang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
7. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan Daerah.
10. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
11. Arah Kebijakan adalah rumusan kerangka pikir atau kerangka kerja untuk menyelesaikan permasalahan pembangunan dan mengantisipasi isu strategis Daerah/Perangkat Daerah yang dilaksanakan secara bertahap sebagai penjabaran strategi.

12. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
13. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
14. Indikator Kinerja adalah tanda yang berfungsi sebagai alat ukur pencapaian kinerja suatu kegiatan, program atau sasaran dan tujuan dalam bentuk keluaran (*output*), hasil (*outcome*), dan/atau dampak (*impact*).

BAB II
RENCANA KERJA

Pasal 2

Renja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada RKPD Tahun 2022.

Pasal 3

(1) Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 menguraikan program, kegiatan dan pagu indikatif Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.
(2) Sistematika Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagai berikut:
    a. Pendahuluan;
    b. Hasil Evaluasi Renja Perangkat Daerah Tahun 2020;
    c. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
    d. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah;
    e. Penutup.
(3) Rincian Renja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib melaksanakan Renja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Desember 2021

BUPATI MALANG,

Ttd.

SANUSI

Diundangkan di Kepanjen
pada tanggal 21 Desember 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALANG,

Ttd.

WAHYU HIDAYAT

Berita Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2021 Nomor 110 Seri D

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI MALANG
NOMOR 110 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TAHUN 2022

RENCANA KERJA
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO
TAHUN 2022

BAB I
PENDAHULUAN

1.1.1. LATAR BELAKANG

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional bahwa setiap perangkat daerah berkewajiban menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah. Salah satu dokumen perencanaan pembangunan daerah adalah Rencana Kerja yang merupakan dokumen perencanaan pemerintah untuk periode 1 (satu) tahun dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis dokumen rencana kerja pemerintah 5 tahunan, yang juga dijadikan sebagai tolak ukur penilaian kinerja penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan sebagai dasar pertanggungjawaban Kepala Daerah. Selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah bahwa keterpaduan pola perencanaan pembangunan daerah menjadi poin yang penting dalam siklus penyelenggaraan pemerintahan.

Penggunaan aplikasi SIPD telah diimplementasikan Pemerintah Kabupaten Malang sejak tahun 2020 dan sejalan dengan amanat Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 14 yang menyatakan bahwa proses penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah harus berbasis *e-planning* maka seluruh program kerja yang dilakukan dapat terintegrasi dan proses dokumen rencana kerja dapat terseleseikan dengan mudah, cepat dan tepat.

Proses Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah terdiri dari 6 tahapan utama yaitu:

1. Persiapan Penyusunan,
2. Penyusunan Rancangan Awal,
3. Penyusunan Rancangan,
4. Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah,
5. Perumusan Rancangan Akhir, dan
6. Penetapan Rencana Kerja.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2022 berdasarkan Surat Sekretarit Daerah Nomor 005/7865/35.07.032/2020 tanggal 25 November 2020 tentang Rapat Koordinasi Persiapan Penyusunan RKPD Kabupaten malang, Surat Edaran Bupati Malang, Nomor: 005/2139/35.07.032/2021, tanggal 26 Februari 2021 tentang Pedoman Penyempurnaan Rancangan Awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, Surat Kepala Bappeda Kabupaten Malang, Nomor: 050/1900/35.07.202/2021, tanggal 17 Maret 2021 tentang Rancangan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Tahun 2022, Dan Surat Sekretariat Daerah, Nomor 005/4005/35.07.032/2021 tanggal 18 Mei 2021 tentang Rapat Koordinasi Rancangan Akhir Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021, Rencana Kerja ini disesuaikan dengan Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2016-2021 dan tidak menyimpang dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021. Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Keterkaitan Seluruh dokumen perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan yang saling berkaitan satu dengan yang lain. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah adalah dokumen yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan penjabaran dari visi dan misi Pemerintah Daerah. Sebagai bahan masukan penyusunan rancangan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah adalah Rancangan Awal Rencana Strategis Perangkat Daerah. Selanjutnya setelah Rencana

Pembangunan Jangka Menengah Daerah disahkan maka menjadi acuan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan.

Rencana Kerja merupakan penjabaran dari Rencana Strategis, dan dalam penyusunannya mengacu pada Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Rencana Kerja juga sebagai bahan masukan untuk penyusunan Rencana Kerja Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja Anggaran dimaksud selanjutnya menjadi salah satu acuan penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah. Rencana Kerja juga perlu mengakomodir hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan, Forum Satuan Kerja Pemerintah Daerah, pokok-pokok pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan kebijakan Pemerintah Pusat/Provinsi Jawa Timur.

ALUR PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

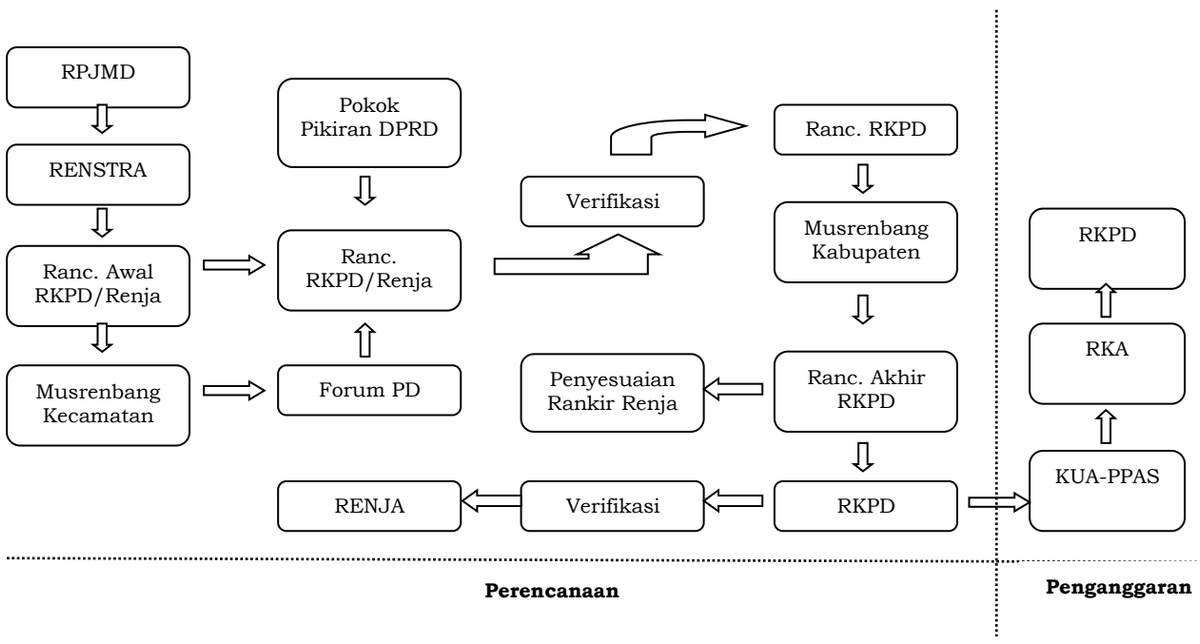

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2022 mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022 dan merupakan penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Daerah Tahun 2021-2026, yang tentunya mendukung Visi dan Misi Bupati Malang sebagaimana dijabarkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026.

Selanjutnya Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2022 ini akan menjadi bahan penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan

Usaha Mikro Tahun 2022, serta menjadi pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun 2022 dan selanjutnya akan dievaluasi melalui penilaian terhadap realisasi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk mengetahui realisasi pencapaian target indikator kinerja, dan penyerapan anggaran.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026, maka Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang berperan dalam mendukung Misi ke-1 (kesatu) Bupati Malang yaitu Mewujudkan Kesejahteraan Rakyat, membangun Sumber Daya Manusia Unggul dengan tujuan memperluas Akses lapangan kerja dan Wirausaha Baru. Hal tersebut berkaitan dengan Misi Kementerian Koperasi dan UKM pada Rencana Strategis Kementerian Koperasi dan UKM tahun 2020-2024 yaitu Mewujudkan Koperasi Generasi Baru yang maju dan modern dan mewujudkan UMKM yang mampu bersaing di Pasar Domestik dan Global. Dan juga berkaitan dengan tujuan Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Jawa Timur yaitu meningkatnya PDRB Koperasi dan UMKM di Jawa TImur.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan Hukum penyusunan Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2022 sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 186);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 3/E);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008 tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016 Nomor 1 Seri C), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 1 Seri C);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 3 Seri D);
19. Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2019 Nomor 12 Seri C);
20. Peraturan Bupati Malang Nomor 34 Tahun 2017 tentang Mekanisme Tahunan Penyelenggaraan Pemerintahan Kabupaten Malang (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2017 Nomor 3 Seri D);
21. Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 (Berita Daerah Kabupaten Malang Tahun 2021 Nomor 17 Seri D);

1.3. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Maksud menetapkan dokumen perencanaan yang memuat program dan kegiatan pembangunan daerah yang menjadi tolak ukur penilaian kinerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama Tahun 2021.

Tujuan menciptakan dan sinergitas perencanaan program kegiatan pembangunan selama Tahun 2021 serta mewujudkan efisiensi dan evektifitas dalam perencanaan alokasi sumber daya dalam pembangunan daerah.

1.4. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

1.3. Maksud dan Tujuan

1.4. Sistematika Penulisan

BAB II HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2020 dan capaian Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan

2.3. Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi

2.4. Review Terhadap Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana PD

3.3. Program dan Kegiatan

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

BAB V PENUTUP

BAB II
HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2020

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja PD Tahun Lalu dan Capaian Renstra

Merujuk pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Evaluasi Rancangan Perda Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang daerah, Rencana Pembangunan Jaangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, setiap dokumen perencanaan harus dievaluasi dalam pelaksanaannya, hal ini adalah sebagai tolak ukur capaian kinerja pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Dalam penyusunan program dan kegiatan telah ditetapkan indikator kinerja program (*outcome*) dan kegiatan (*output*) serta target kinerja capaian program/kegiatan maupun realisasi.

Tahun 2019 Dinas Koperasi dan Usaha Mikro melaksanakan 11 program dan 36 kegiatan. Kegiatan-kegiatan tersebut dialokasikan sesuai dengan kebutuhan pembangunan. Sesuai dengan realisasi anggaran program/kegiatan yang telah ditetapkan sampai triwulan ke empat tahun 2020 dapat terealisasi 97,35%. Tingkat realisasi penyerapan anggaran tinggi pada triwulan ke empat tahun 2020 pada program Pelayanan Administrasi Perkantoran, Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Program Peningkatan Disiplin Aparatur, Program Peningkatan Sumber Daya Aparatur, Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan, Program Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi Dan Usaha Mikro, Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi Dan Usaha Mikro sebesar 100%, sedangkan Tingkat realisasi penyerapan anggaran terendah pada triwulan ke empat tahun 2020 pada Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro karena program tersebut ada sebagian yang belum dilaksanakan. Evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja tahun sebelumnya dan tingkat capaian Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel 2.1 berikut :

Tabel 2.1

Rekapitulasi hasil evaluasi hasil Pelaksanaan Renja PD dan Pencapaian Renstra PD s/d 2021

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang

NO	URUSAN/BIDANG URUSAN PEMERINTAH DAERAH/PROGRAM/KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM (OUTCOME) DAN KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET KINERJA CAPAIAN PROGRAM RENSTRA PD s/d TAHUN 2021	REALISASI TARGET KINERJA HASIL PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN S/D TAHUN 2019	TARGET & REALISASI KINERJA PROGRAM DAN KELUARAN KEGIATAN TAHUN 2020			TARGET PROGRAM DAN KEGIATAN RENJA PD TAHUN BERJALAN (TAHUN 2021)	PERKIRAAN REALISASI CAPAIAN TARGET RENSTRA PROGRAM/KEGIATAN RENSTRA PD S/D TAHUN 2021 (TAHUN BERJALAN)	
					TARGET RENJA PD TAHUN 2020	REALISASI RENJA PD TAHUN 2020	TINGKAT REALISASI (%)		REALISASI CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN S/D TAHUN 2021	TINGKAT CAPAIAN REALISASI TARGET RENSTRA(%)
1	2	3	4	5	6	7	8=(7/6)	9	10	11=(10/4)
	Urusan Wajib									
I	**Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**	**Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)**	**100 %**	**100%**	**100%**	**97.99 %**	**97,99**	**100%**	**100 %**	**100**
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	22500 Buah	12924 Buah	4500 Buah	4423 Buah	98,29	4500 Buah	4500 Buah	100

2	Penyediaan Jasa Komunikasi sumber daya air dan listrik	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	60 Bulan	36 Bulan	12 Bulan	12 Bulan	100,00	12 Bulan	12 Bulan	100
3	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	874 OB	609 OB	607 OB	607 OB	100,00	604 OB	604 OB	100
4	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	Jumlah petugas kebersihan (OB)	36 OB	-	-	-	-	-	-	-
5	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	320 Jenis	171 Jenis	62 Jenis	62 Jenis	100	62 Jenis	62 Jenis	100
6	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	68 Jenis	38 Jenis	11 Jenis	11 Jenis	100	11 Jenis	11 Jenis	100
7	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	49 Jenis	29 Jenis	12 Jenis	12 Jenis	100	9 Jenis	9 Jenis	100
8	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	5 Jenis	3 Jenis	1 Jenis	1 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
9	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	10 Jenis	5 Jenis	4 Jenis	4 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
10	Penyediaan Makanan dan Minuman	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	23184 HOK	8808 HOK	3886 HOK	3886 HOK	100	1727 HOK	1727 HOK	100
11	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Luar Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	190 HOK	157 HOK	25 HOK	25 HOK	100	138 HOK	138 HOK	100

12	Rapat-Rapat Kordinasi dan Konsultasi Ke Dalam Daerah	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	1367 HOK	785 HOK	387 HOK	387 HOK	100	266 HOK	266 HOK	100
II	**Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur**	**Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100%**	**100%**	**100**
1	Pengadaan Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	6 Unit	2 Unit	-	2 Unit	100	-	-	-
		Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	4 Unit	-	-	-	-	-	-	100
2	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	15 Jenis	11 Jenis	7 Jenis	7 Jenis	100	1 Jenis	1 Jenis	100
3	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	19 Jenis	14 Jenis	6 Jenis	6 Jenis	100	3 Jenis	3 Jenis	100
4	Pengadaan Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	16 Jenis	9 Jenis	0 Jenis	0 Jenis	100	22 Jenis	22 Jenis	100
5	Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	132 Jenis	76 Jenis	30 Jenis	30 Jenis	100	-	-	100
6	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/Operasional	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	136 Unit	67 Unit	20 Unit	20 Unit	100	18 Unit	18 Unit	100
7	Pemeliharaan Rutin/Berkala Peralatan Gedung Kantor	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	25 Jenis	16 Jenis	2 Jenis	2 Jenis	100	6 Jenis	6 Jenis	100

8	Pemeliharaan Rutin/Berkala Mebeleur	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	7 Jenis	-	1 Jenis	1 Jenis	100	-	-	-
III	**Program Peningkatan Disiplin Aparatur**	**Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Pengadaan Mesin/Kartu Absensi	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	3 Unit	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengadaan Pakaian Khusus hari-hari tertentu	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga (Stel)	233 Stel	54 Stel	54 Stel	54 Stel	100	54 Stel	54 Stel	100
IV	**Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**	**Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Jumlah aparat yang mengikuti diklat formal	71 Orang	43 Orang	12 Orang	12 Orang	100	15 Orang	15 Orang	100
V	**Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan**	**Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja PD	Jumlah Dokumen SAKIP (Buku)	5 Buku	5 Buku	3 Buku	3 Buku	100	3 Buku	3 Buku	100
2	Penyusunan Pelaporan Keuangan Akhir Tahun	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	5 Buku	3 Buku	1 Buku	1 Buku	100	1 Buku	1 Buku	100
VI	**Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif**	**Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	-	**-**	**-**	-

		pelayanan bagi KUMKM								
1	Fasilitasi Pengembangan Usaha Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset Koperasi	54 kop/KUD	-	-	-	-	-	-	-
2	Penguatan Sarana dan Prasarana Kelembagaan Bagi Tenaga Kerja Industri Hasil Tembakau	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	1.200 Orang	-	-	-	-	-	-	-
VII	**Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah**	**Persentase SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-
1	Memfasilitasi Peningkatan Kemitraan Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	70 Kop	-	-	-	**-**	-	-	-
2	Pembinaan Kemampuan dan Ketrampilan Kerja Masyarakat di Lingkungan Industri Hasil Tembakau dan/atau Daerah Penghasil Bahan Baku Industri Hasil Tembkau	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	5.300 Orang	-	-	-	**-**	-	-	-
VIII	**Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha bagi Usaha Mikro Kecil Menengah**	**Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	-

1	Sosialisasi dukungan informasi penyediaan permodalan	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	90 Koperasi Wanita	-	-	-	-	-	-	-
2	Koordinasi Pemanfaatan Fasilitas Pemerintah untuk Usaha Kecil Menengah dan Koperasi	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	400 Kopwan/Kopkar/KSPPS/Koppontren	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	47 jenis	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah KUMKM yang difasilitasi Promosi dan Pameran	75 KUMKM	-	-	-	-	-	-	-
4	Penyelenggaraan Pembinaan Industri Rumah Tangga, Industri Kecil dan Industri Menengah	Jumlah KUMKM yang diberikan layanan berupa Fasilitasi, Konsultasi dan Advokasi pada KUMKM terhadap Permasalahan yang dihadapi (Permodalan, Pemasaran,TTG dan Peningkatan SDM UMKM)	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yan difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	100 UMKM	-	-	-	-	-	-	-

5	Penyelenggaraan Promosi Produk Usaha Mikro Kecil Menengah	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	11 KUMKM	-	-	-	-	-	-	-
6	Pengembangan Kebijakan dan Program Peningkatan Ekonomi Lokal	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	70 Koperasi dan 150 Orang	-	-	-	-	-	-	-
7	Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penggunaan Dana Pemerintah bagi Koperasi	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	70 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
IX	**Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi**	**Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	-	-	-	-
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	290 Kopwan	-	-	-	-	-	-	-
2	Sosialisasi Prinsip-Prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian	97 KSPPS, 35 Koperasi dan 15 KEP	-	-	-	-	-	-	-

		dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP								
3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	10 Koperasi	-	-	-	-	-	-	-
4	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	360 Kop	-	-	-	-	-	-	-
X	**Program Peningkatan Pelayanan**	**Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM**	**100 %**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
1	Kegiatan Pendukung Pelayanan	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	255 KUMKM	-	-	-	-	-	-	-
XI	**Program Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro**	**Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	560 Koperasi Wanita	140 Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita	0 Koperasi Wanita	100	-	-	-
		Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	440 Orang	310 Orang	315 Orang	315 Orang	100	210 Orang	210 Orang	100

2	Sosialisasi Prinsip - prinsip Pemahaman Perkoperasian	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	400 Orang	282 Orang	200 Orang	200 Orang	100	200 Orang	200 Orang	100
3	Pembinaan, Pengawasan dan Penghargaan Koperasi Berprestasi	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	20 Koperasi	10 Koperasi	0 Koperasi	0 Koperasi	100	5 Koperasi	5 Koperasi	100
		Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	200 Koperasi	100 Koperasi	410 Koperasi	410 Koperasi	100	50 Koperasi	50 Koperasi	100
XII	**Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro**	**Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100 %**	**100 %**	100
1	Penguatan Manajemen Usaha dan daya Saing Produk Koperasi dan Usaha Mikro	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	420 Koperasi	120 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	100	100 Koperasi	100 Koperasi	100
2	Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui Pameran Tingkat Regional dan Nasional	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	235 Koperasi/UMK	135 Koperasi/UMK	11 Koperasi/UMK	11 Koperasi/UMK	100	75 Koperasi/UMK	75 Koperasi/UMK	100
3	Pengembangan Inkubakator Teknologi dan Bisnis serta diversifikasi Usaha Produk Koperasi	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	520 Orang	200 Orang	50 Orang	50 Orang	100	100 Orang	100 Orang	100

XIII	**Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro**	**Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan**	**100 %**	**100%**	**100%**	**100%**	**100**	**100%**	**100%**	100
1	Koordinasi dan Penguatan Akses Permodalan Koperasi Serta Jaringan Kerjasama Usaha Simpan Pinjam Antar Koperasi	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	1036 Koperasi	194 Koperasi	50 Koperasi	50 Koperasi	100	97 Koperasi	97 Koperasi	100
2	Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	480 Koperasi	230 Koperasi	55 Koperasi	55 Koperasi	100	110 Koperasi	120 Koperasi	100
3	Penilaian Kesehatan Koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	485 Koperasi	160 Koperasi	582 Koperasi	582 Koperasi	100	80 Koperasi	80 Koperasi	100
XIV	**Program Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha**	**Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Pengembagan Jaringan Kerjasama	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	530 Orang	130 Orang	-	-	100	50 Orang	50 Orang	100
		Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	6 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	11 Kecamatan	-	2 Kecamatan	2 Kecamatan	100

		Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi ,legalitas,pendamping an dan permasalahan produk	45 Kecamatan	-	-	-	-	-	-	-
2	Pengembangan Kewirausahaan	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	300 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	225 Orang	-	-	-	-	-	-	-
3	Pengembangan Sarana Pemasaran Produk Usaha Mikro	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	1 Pameran	-	-	-	-	-	-	-
4	Pengembangan Informasi Bisnis	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	6 Kali	-	-	-	-	-	-	-
		Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	3 Kali	-	-	-	-	-	-	-

		Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	300 Orang	500 Orang	200 Orang	200 Orang	100	250 Orang	250 Orang	100
XV	**Program Peningkatan Permodalan Koperasi dan Usaha Mikro**	**Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir**	**100 %**	**100 %**	**100%**	**100 %**	**100**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Peningkatan Permodalan KUMKM Melalui UPT Pengelola Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	500 KUMKM	246 KUMKM	75 KUMKM	75 KUMKM	100	125 KUMKM	125 KUMKM	100
XVI	**Program Pembinaan Lingkungan Sosial**	**Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan**	**100 %**	**100 %**		**95,42 %**	**95,42**	**100 %**	**100 %**	**100**
1	Pembinaan dan Pelatihan Ketrampilan Kerja bagi Tenaga Kerja dan Masyarakat	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	10775 Orang	6125 Orang	4250 Orang	4250 Orang	100	3400 Orang	3400 Orang	100
		Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	900 Orang	-	-	-	-	-	-	-

2	Fasilitasi Promosi bagi Usaha mandiri masyarakat	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	24 Kali	1 Kali	1 Kali	1 Kali	100	-	-	-
		Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan	18 Kali	7 Kali	5 Kali	5 Kali	100	6 Kali	6 Kali	100
		Jumlah Usaha Mikro dan Kecil yang diberikan Fasilitas Promosi Serta Fasilitasi Pameran Lokal dan Nasional	35 UKM	-	-	-	-	-	-	-
	Bantuan Sarana Produksi dan Ternak Masyarakat/ Kelompok Masyarakat	Jumlah Bantuan Peralatan Bagi Usaha Mandiri (UMKM) yang terdampak Covid 19	0 UMKM	-	-	-				
		Jumlah Bantuan Peralatan Bagi Usaha Mandiri (Kelompok) yang terdampak Covid 19	0 Kelompok	0 Kelompok	50 Kelompok	50 Kelompok				
	Bantauan Modal Usaha Bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	Jumlah Bantuan Modal Usaha kepada UMKM	0 UMKM	-	-	-				

Dengan melihat Tabel 2.1 dapat dilihat bahwa Dinas Koperasi dan usaha Mikro mempunyai 11 program yang terdiri dari 36 kegiatan dan pada pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2020 pada triwulan ke IV (empat) sudah terealisasi rata rata sebesar 97,35 % sehingga Kegiatan tetap berjalan dan dapat dilaksanakan lebih optimal sesuai dengan target, sedangkan untuk target Renstra Tahun 2016 s/d 2021 Pemanfaatan dana tepat sasaran bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) sampai saat 71,2 % dari target semula. Program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang mendukung Pengarus Utamaan Gender meliputi Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro dengan kegiatan Sosialisasi prinsip – prinsip Pemahaman Perkoperasian, Program Peningkatan Produksi dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Pengembangan Inkubator Tekologi dan bisnis serta diversivikasi Usaha Produk Koperasi, Program Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro dengan Kegiatan Penataan Manajemen Usaha Simpan Pinjam Koperasi, Program Pengembangan dan Restrukturasi Usaha dengan Kegiatan Pengembangan Jaringan Kerjasama

Permasalahan anggaran cukup menjadi kendala tersendiri mengingat ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan/ajuan dari PD, sehubungan dengan hal tersebut pelaksanaan program dan kegiatan akan disesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Mengingat tugas pokok dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Teknis yang melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro di Kabupaten Malang dengan kegiatan antara lain : koordinasi, konsultasi, pengumpulan data, Penyuluhan dan Pembentukan Koperasi, Pembinaan, evaluasi dan monitoring sehingga mobilitasnya cukup tinggi.

2.2. ANALISIS KINERJA PELAYANAN

Sebagaimana telah dijelaskan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 225 Tahun 2019 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang pada intinya adalah Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan kegiatan. Adapun kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten malang meliputi:

a. Sebagai Lembaga yang membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan teknis dibidang Koperasi dan Usaha Mikro;
b. Melaksanakan Supremasi Hukum di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro;
c. Menumbuh dan Mengembangkan Kelembagaan Koperasi dan Usaha Mikro;
d. Meningkatkan peran Koperasi dan Usaha Mikro;
e. Meningkatkan ketrampilan, teknologi proses dan jaringan distribusi serta menyediakan fasilitas konsultasi dan informasi bagi Pengusaha Mikro untuk memperluas akses pasar;
f. Meningkatkan Akses Koperasi dan Usaha Mikro terhadap pemanfaatan sumber daya produktif pada Masyarakat;
g. Mengembangkan sistem ekonomi kerakyatan melalui Koperasi dan Usaha Mikro yang bertumpu pada mekanisme pasar yang berkeadilan;
h. Mengembangkan Pola Kerjasama Kemitraan yang sinergis dan saling menguntungkan antara Koperasi dan Usaha Mikro dengan Perbankan, Swasta, BUMN / BUMD dan Lembaga Keuangan Lainya;
i. Mengumpulkan, mengelola dan menganalisa data untuk kebutuhan perencanaan, monitoring dan evaluasi;
j. Tugas lain yang diberikan oleh Bupati kepada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

Dalam penyusunan dokumen perencanaan, maka telah dihasilkan dokumen perencanaan utama Kabupaten Malang yaitu:

1. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005–2025, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten

Malang Nomor 6 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Malang Tahun 2005-2025;

2. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang tahun 2016-2021;
3. Rencana Kerja Pemerintah Daerah tahun 2022, sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Malang Nomor 17 Tahun 2021 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022;
4. Rencana Tata Ruang Wilayah Tahun 2010-2030 sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah.

Pencapaian kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditentukan yaitu sasaran I yaitu Persentase Jumlah Koperasi Rehabilitasi dengan target 1,9% pada tahun 2020 tercapai 5,61% sedangkan sasaran II yaitu persentase Usaha Mikro Kecil yang mendapatkan legalitas usaha dengan target 0,05% pada tahun 2020 tercapai 0,74% sehingga program dan kegiatan yang telah dilakukan berjalan dengan baik terutama dengan adanya UPT Pengelola Dana Bergulir, Pusat Layanan Usaha Terpadu Koperasi dan UMKM, maka dapat memberi dukungan maupun memberikan fasilitas kepada Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kabupaten Malang sehingga akan semakin mengalami peningkatan dengan harapan akan berdampak positif bagi perekonomian maupun kesejahteraan masyarakat di Wilayah Kabupaten Malang. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.2 di bawah ini.

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro
Kabupaten Malang

No	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK / IKU	Target Renstra PD Tahun ke				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	Tahun 2023	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	**Persentase Koperasi Aktif**	-	√	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
2	**Persentase Pertumbuhan UMKM**	-	√	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	
3	**Persentase Koperasi Rehabilitasi**	-	√	**1,9%**	**1,0%**	**-**	**-**	**5,62%**	**1,0%**	**-**	**-**	
4	**Persentase Usaha Mikro dan Kecil yang mendapatkan Legalitas Usaha**	-	√	**0,05%**	**0,05%**	**-**	**-**	**0,74%**	**0,05%**	**-**	**-**	
Indikator program-program Dinas Koperasi dan Usaha Mikro												
1	Persentase Pemenuhan Operasional Perkantoran (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
2	Persentase Pemenuhan Sarana dan Prasarana Penunjang Aparatur (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
3	Persentase Penunjang Kerja Aparatur (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
4	Persentase Peningkatan Kapasitas Pegawai di Perangkat Daerah (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
5	Persentase Dokumen Perencanaan, Laporan Keuangan dan Kinerja Perangkat Daerah yang Tepat Waktu (%)	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
6	Presentase Koperasi yang telah dibina kelembagaan dan Pengawasan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	

7	Persentase Jumlah koperasi yang mendapat akses peningkatan produksi dan pemasaran	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
8	Persentase Koperasi yang Mendapatkan peningkatan akses pembiayaan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
9	Persentase Usaha yang dikembangkan dan direstrukturisasi	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
10	Persentase target pendapatan Asli Daerah melalui Dana bergulir	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
11	Persentase masyarakat yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	100%	100%	-	-	100%	100%	-	-	
12	Persentase fasilitasi pengembangan usaha kecil menengah untuk kemudahan pelayanan bagi KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
13	Persentase SDM KUMKM dalam pengembanagn kewirausahaan dan peningkatan ketrampilan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
14	Persentase peningkatan pemahaman tentang pengelolaan koperasi dan pengawasan koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
15	Persentase pengembangan sistem pendukung usaha bagi usaha mikro, kecil dan menengah	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
16	Cakupan Pemenuhan Pelayanan Bantuan Dana Bergulir bagi KUMKM	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Indikator Kegiatan-kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro												
1	Jumlah registrasi surat masuk dan surat keluar (buah)	-	-	4500 Buah	4500 Buah	-	-	4500 Buah	4500 Buah	-	-	
2	Jumlah Penyediaan Listrik, Air Minum/Air Bersih, Telekomunikasi dan Internet (Bulan)	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	12 Bulan	12 Bulan	-	-	
3	Jumlah pejabat pengelola administrasi keuangan (OB)	-	-	604 OB	204 OB	-	-	604 OB	204 OB	-	-	
4	Jumlah petugas kebersihan (OB)	-	-	-	70 Jenis	-	-	-	70 Jenis	-	-	
5	Jumlah alat tulis kantor yang disediakan (Jenis)	-	-	62 Jenis	14 Jenis	-	-	62 Jenis	14 Jenis	-	-	
6	Jumlah barang cetakan yang disediakan (Jenis)	-	-	11 Jenis	10 Jenis	-	-	11 Jenis	10 Jenis	-	-	
7	Jumlah penyediaan komponen alat-alat listrik dan elektronik (Jenis)	-	-	9 Jenis	1 Jenis	-	-	9 Jenis	1 Jenis	-	-	

8	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang disediakan (jenis)	-	-	1 Jenis	2 Jenis	-	-	1 Jenis	2 Jenis	-	-	
9	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan (jenis)	-	-	1 Jenis	5000 HOK	-	-	1 Jenis	5000 HOK	-	-	
10	Jumlah makanan dan minuman harian Pegawai, Rapat, dan tamu yang disediakan (HOK)	-	-	1727 HOK	40 HOK	-	-	1727 HOK	40 HOK	-	-	
11	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke luar daerah (HOK)	-	-	138 HOK	275 HOK	-	-	138 HOK	275 HOK	-	-	
12	Jumlah pegawai memenuhi penugasan dinas ke dalam daerah (HOK)	-	-	266 HOK	4500 Buah	-	-	266 HOK	4500 Buah	-	-	
13	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 4 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	
14	Jumlah kendaraan Dinas/Operasional Roda 2 Baru yang diadakan (Unit)	-	-	-	2 Unit	-	-	-	2 Unit	-	-	
15	Jumlah Perlengkapan Gedung Kantor yang diadakan(jenis)	-	-	1 Jenis	4 Jenis	-	-	1 Jenis	4 Jenis	-	-	
16	Jumlah Peralatan Gedung Kantor yang diadakan (jenis)	-	-	3 Jenis	4 Jenis	-	-	3 Jenis	4 Jenis	-	-	
17	Jumlah Mebeleur yang diadakan (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
18	Jumlah gedung kantor yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	22 Jenis	27 Jenis	-	-	22 Jenis	27 Jenis	-	-	
19	Jumlah kendaraan roda empat dan kendaraan roda dua yang dipelihara rutin dan berkala (Unit)	-	-	18 Unit	28 Unit	-	-	18 Unit	28 Unit	-	-	
20	Jumlah Peralatan Gedung Kantoryang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	6 Jenis	5 Jenis	-	-	6 Jenis	5 Jenis	-	-	
21	Jumlah Mebeleur yang dipelihara Rutin/Berkala (jenis)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
22	Jumlah Mesin/Kartu Absensi yang diadakan (unit)	-	-	-	1 Unit	-	-	-	1 Unit	-	-	
23	Jumlah penyediaan Pakaian Olahraga/Batik (Stel)	-	-	54 Stel	60 Stel	-	-	54 Stel	60 Stel	-	-	
24	Jumlah Pegawai yang mengikuti pelatihan (orang)	-	-	15 Orang	15 Orang	-	-	15 Orang	15 Orang	-	-	
25	Jumlah Dokumen Laporan Kinerja (LKJ-IP/Profile Kinerja PD/Survei Kepuasan Masyarakat) (Buku)	-	-	3 Buku	1 Buku	-	-	3 Buku	1 Buku	-	-	
26	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir (Buku)	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	1 Buku	1 Buku	-	-	
27	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Koperasi Wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
28	Jumlah Kelompok ekonomi produktif yang diberikan sosialisasi perkoperasian	-	-	210 Orang	110 Orang	-	-	210 Orang	110 Orang	-	-	

29	Jumlah peserta bimbingan teknis perkoperasian bagi Anggota Koperasi	-	-	200 Orang	100 Orang	-	-	200 Orang	100 Orang	-	-	
30	Jumlah Pembinaan Koperasi Berprestasi	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	-	-	5 Koperasi	5 Koperasi	-	-	
31	Jumlah peserta sosialisasi peningkatan SDM Koperasi	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	-	-	50 Koperasi	50 Koperasi	-	-	
32	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	-	-	100 Koperasi	120 Koperasi	-	-	100 Koperasi	120 Koperasi	-	-	
33	Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	-	-	75 Koperasi/UMK	60 Koperasi/UMK	-	-	75 Koperasi/UMK	60 Koperasi /UMK	-	-	
34	Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	-	-	100 Orang	150 Orang	-	-	100 Orang	150 Orang	-	-	
35	Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	-	-	97 Koperasi	97 Koperasi	-	-	97 Koperasi	97 Koperasi	-	-	
36	Jumlah Koperasi yang di berikan bimbingan teknis Manajemen Usaha Simpan Pinjam sesuai dengan ketentuan	-	-	110 Koperasi	120 Koperasi	-	-	110 Koperasi	120 Koperasi	-	-	
37	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	-	-	80 Koperasi	80 Koperasi	-	-	80 Koperasi	80 Koperasi	-	-	
38	Jumlah UMKM yang difasilitasi temu bisnis dalam rangka peningkatan jaringan usaha dan permodalan	-	-	50 Orang	150 Orang	-	-	50 Orang	150 Orang	-	-	
39	Jumlah Kecamatan yang di petakan produk unggulan	-	-	2 Kecamatan	-	-	-	2 Kecamatan	-	-	-	
40	Jumlah kecamatan yang difasilitasi akses permodalan,SDM, manajemen,informasi,legalitas,pendampingan dan permasalahan produk	-	-	-	15 Kecamatan	-	-	-	15 Kecamatan	-	-	
41	Jumlah Peserta pelatihan ketrampilan peningkatan kualitas produk	-	-	-	100 Orang	-	-	-	100 Orang	-	-	
42	Jumlah peserta bimbingan teknis ketrampilan dan manajerial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
43	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui pendampingan UMKM	-	-	-	75 Orang	-	-	-	75 Orang	-	-	
44	Jumlah fasilitasi promosi di tingkat Nasional, tingkat Provinsi dan tingkat Kabupaten	-	-	-	-	75 Orang	-	-	-	-	-	

45	Jumlah Pameran yang diikuti/diadakan	-	-	-	2 Kali	-	-	-	2 Kali	-	-	
46	Jumlah promosi (Replikasi) yang diikuti atau diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
47	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui konsultasi klinik KUMKM	-	-	250 Orang	-	-	-	250 Orang	-	-	-	
48	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	-	-	125 KUMKM	125 KUMKM	-	-	125 KUMKM	125 KUMKM	-	-	
49	Jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan,penigkatan kualitas dan manajemen usaha	-	-	-	300 Orang	-	-	-	300 Orang	-	-	
50	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	-	-	3400 Orang	2500 Orang	-	-	3400 Orang	2500 Orang	-	-	
51	Jumlah Pameran tingkat lokal,tingkat kabupaten dan tingkat nasional yang diikuti/diadakan			6 Kali	6 Kali			6 Kali	6 Kali			
52	Jumlah Usaha Mikro dan kecil yang diberikan fasilitas promosi serta fasilitasi pameran lokal dan nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
53	Jumlah Promosi melalui media cetak dan elektronik	-	-	-	8 Kali	-	-	-	8 Kali	-	-	
54	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi dan yang dievaluasi tentang optimalisasi aset-aset koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
55	Jumlah peserta pelatihan bagi tenaga kerja industri hasil tembakau	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
56	Jumlah Koperasi yang diberikan bimbingan teknis pengembangan kemitraan usaha sektor riil dan temu usaha pengembangan jaringan usaha Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
57	jumlah orang yang diberikan pelatihan ketrampilan kerja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
58	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
59	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

59	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
60	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
61	Jumlah Peserta bimbingan teknis pengendalian dan pengawasan bagi pengawas koperasi wanita	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
62	Jumlah Koperasi (Pengurus, Pengawas dan anggota Koperasi) yang diberikan bimbingan teknis perkoperasian dan Kelompok Ekonomi Produktif yang diberikan sosialisasi KEP	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
63	Jumlah Penilaian terhadap Calon Koperasi Berprestas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
64	Jumlah Koperasi yang dinilai Kesehatannya (Penilaian Kesehatan Koperasi)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
65	Jumlah Koperasi yang diberikan sosialisasi peningkatan akses pembiayaan Koperasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
66	Jumlah Koperasi penerima dana hibah pemerintah yang diberikan fasilitasi pembinaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
67	Jumlah Sarana dan Prasarana Pusat Layanan Usaha Terpadu-Koperasi dan UMKM (PLUT-KUMKM) yang diadakan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
68	Jumlah UMKM yan difasilitasi promosi produk UMKM Tingkat Kabupaten dan Tingkat Provinsi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
69	Jumlah KUMKM yang difasilitasi Kegiatan Promosi Produk KUMKM yang dipamerkan di luar daerah provinsi dan di tingkat nasional.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
70	Jumlah Peserta pelatihan pengembangan usaha retail dan pelatihan pengembangan usaha PKL	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
71	Jumlah Koperasi beranggota Pelaku UMKM penerima dana pemerintah yang dimonitoring dan dievaluasi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
72	jumlah UMKM dan Koperasi yang diberikan pelayanan Bantuan Dana Bergulir untuk Peningkatan Permodalan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

2.3. ISU-ISU PENTING PENYELENGGARAAN TUGAS DAN FUNGSI

Sebagai salah satu Dinas di Kabupaten Malang yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, maka peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dalam mendukung Visi dan Misi Kabupaten yaitu "Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Malang yang Madep Mantep Manetep" adalah dengan Mewujudkan Pertumbuhan Koperasi dan Usaha Mikro yang mempunyai daya saing tinggi serta mendukung iklim usaha yang kondusif, dan akan berpengaruh pada penciptaan kondisi ekonomi yang berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat dan pendapatan daerah yaitu dengan cara melaksanakan kinerja sesuai dengan prinsip-prinsip perkopersian dan perundang – undangan yang berlaku.

Untuk mencapai kondisi kinerja yang akuntabel dan optimal setiap satuan kerja harus mengatasi permasalahan yang dihadapi oleh satuan kerja tersebut, adapun permasalahan yang terindentifikasi pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang antara lain:

a. Adanya Pandemi Corona Virus Diseases (Covid 19) yang terjadi di seluruh dunia sehingga mempengaruhi UMKM dan Koperasi antara lain Penjualan Menurun, Kesulitan Bahan Baku, terhambatnya distribusi, masalah permodalan dan masalah produksi.
b. Kurang adanya pemahaman Pelayanan tentang Perkoperasian dan Kewirausahaan dari satuan kerja terkait di lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang terkait Tuntutan masyarakat terhadap pelayanan prima sangat tinggi;
c. Berlakunya perdagangan bebas menyebabkan tingkat persaingan semakin kompetitif bagi Pelaku UMKM dan Koperasi
d. Krisis keuangan dan perekonomian global serta dampaknya terhadap keuangan dan perekonomian Nasional dan daerah.
e. Angka kemiskinan dan pengangguran masih tinggi.
f. Sumberdaya manusia

   Keterbatasan kemampuan dan pemahaman para pengelola koperasi tentang teknis perkoperasian serta pemahaman tentang wawasan pengetahuan dan ketrampilan kewirausahaan kurang memadai, sehingga berdampak kepada pengelolaan manajemen, produktifitas Koperasi dan UKM.

g. Permodalan

Kemampuan pemupukan permodalan sendiri bagi anggota Koperasi dan UMKM masih terbatas dan Kemitraan dengan Perbankan dalam membuka terobosan usaha baru masih belum optimal.

h. Teknologi

Kemampuan dalam mengakses teknologi dan alih teknologi masih kurang sehingga belum menghasilkan produksi dengan kualitas dan nilai tambah yang efisien.

i. Kerjasama Usaha / Jaringan Usaha

Kerjasama antar koperasi baik vertikal maupun horisontal dengan badan usaha lain belum dapat berkembang, koperasi masih bekerja untuk kepentingan sendiri dan kurang mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi.

j. Pasar

Belum memanfaatkan peluang pasar yang dimiliki oleh Koperasi dan UMKM utamanya dalam pelayanan kebutuhan anggota dan masyarakat.

Dari permasalahan tersebut diatas upaya-upaya yang perlu dilakukan antara lain:

a. Memberikan stimulus daya beli produk koperasi dan UMKM (Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro);
b. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pedoman atau acuan dalam melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya yang bertujuan antara lain menciptakan komitmen mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan kerja untuk mewujudkan *good governance*, sehingga diharapkan dengan adanya SOP setiap unit kerja dapat menerapkan prosedur kerja dan sistim kerja sesuai tugas pokok dan fungsinya (Bidang Kelembagaan dan Bidang Pengawasan);
c. Penguatan dan Perluasan Akses Usaha dan Jaringan Pasar Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PLUT-KUMKM maupun pameran-pameran baik di tingkat lokal, regional, nasional maupun internasional (Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro);
d. Memberikan Fasilitas Perkuatan Kemandirian Usaha Mikro dengan cara pembinaan atau bimtek (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro);

e. Memberikan pemahaman pengembangan usaha yang bertujuan untuk meningkatkan kewirausahaan KUMKM serta menumbuhkan Wirausaha baru (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro);
f. Memberikan Bimtek agar kualitas SDM pengelola Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (KUMKM) meningkat (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bidang Pemberdayaan Koperasi, Bidang Kelembagaan);
g. Peningkatan Akses Permodalan bagi Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah melalui PPK BLUD Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang atau dari Pemerintah Pusat, Propinsi dan serta dengan Lembaga Perbankan maupun Lembaga non Bank (UPT Pengelola Dana Bergulir, Bidang Pengawasan);
h. Memberikan pelatihan-pelatihan KUMKM yang berbasis IPTEK (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bidang Pemberdayaan Koperasi);
i. Memberikan akses maupun pemahaman kepada KUMKM agar mampu mempergunakan sarana komunikasi dan teknologi dengan baik (Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, Bidang Pemberdayaan Koperasi);
j. Memberikan pemahaman kepada anggota tentang arti pentinnya koperasi (Bidang Kelembagaan).

Adapun tantangan dan peluang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

1. Tantangan
   a. Dengan adanya AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 menjadi tantangan bagi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro untuk meningkatkan daya saing koperasi dan UMKM baik dari sisi kelembagaan maupun dari sisi produk yang dihasilkan.
   b. Peran Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Koperasi dalam perekonomian daerah masih kecil.
   c. Jumlah pengangguran dan masyarakat miskin masih cukup besar.
   d. Produk yang dihasilkan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah masih kurang.
   e. Kurangnya pemahaman prinsip-prinsip perkoperasian sehingga SDM pengelola Koperasi masih kurang memadai.
   f. Kurangnya sumber daya aparatur pelayanan dan sumber pembiayaan terbatas terhadap Koperasi dan UMKM

2. Peluang
   a. Globalisasi perekonomian dunia dan terbukanya pasar bebas untuk ASEAN yaitu AEC (Asian Economic Community) tahun 2015 akan membuka peluang bisnis bagi pelaku
   b. Adanya peluang kebijakan otonomi daerah yang memberi peluang untuk mengapresiasi kebutuhan masyarakat dan merencanakan pembangunan sesuai dengan kebutuhan daerah.
   c. Adanya Arah kebijakan pembangunan daerah dalam memacu pertumbuhan sektor andalan pertanian tanaman pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, industri, perdagangan dan jasa-jasa; serta mendorong pertumbuhan sektor potensi seperti pariwisata, pertambangan dan jasa konstruksi/bangunan dengan mengarusutamakan peran usaha mikro, kecil dan menengah dan koperasi dan pengentasan kemiskinan
   d. Adanya dukungan stakeholder dalam peningkatan ekonomi kerakyatan melalui koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah.
   e. Sumberdaya Alam Kabupaten Malang terkandung kekayaan yang tiada tara dan tersedianya keragaman bahan baku bagi produk inovatif Koperasi dan UMKM.

Sesuai dengan hasil penelaahan terhadap permasalahan, langkah selanjutnya adalah menentukan isu-isu strategis adapun isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Adanya Pandemi Corona Virus Diseases (Covid 19) yang mengakibatkan penurunan pertumbuhan perekonomian.
2. Masih terbatasnya jumlah tenaga perkoperasian dan UMKM yang kompeten.
3. Masih terbatasnya fasilitasi bagi peningkatan akses permodalan bagi koperasi dan UMKM (KUMKM).
4. Daya saing Koperasi dan UMKM di Kabupaten Malang masih lemah dan terbatas.
5. Pembangunan Gedung Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT-KUMKM) pada tahun 2016 di Kabupaten Malang yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM dapat dijadikan fasilitas bagi koperasi dan UMKM untuk meningkatkan daya saing.

6. Revitalisasi Pasar Rakyat di Kecamatan Donomulyo Kabupaten Malang pada tahun 2016, Pasar rakyat di Kecamatan Ngantang pada tahun 2017 dan pasar rakyat di Kecamatan Wonosari Pada Tahun 2019 yang merupakan program kementerian Koperasi dan UMKM merupakan salah satu fasilitas untuk meningkatkan promosi agar lebih baik.

Dari analisa-analisa diatas merupakan isu-isu strategis pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro yang perlu diperhatikan dan merupakan unsur penting dalam setiap pengelolaan pengambilan keputusan dalam kaitannya dengan Koperasi, Usaha Mikro, Kecil dan Menengah Kabupaten Malang, oleh karenanya peningkatan kinerja merupakan sebuah ikhtiar untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsinya.

2.4. REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah merupakan acuan penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022. Dengan berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Kerja Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2016-2021, sehingga perlu dilakukan review terhadap RKPD untuk menyesuaikan dengan Misi Bupati yang didukung sasaran, strategi dan kebijakan serta hasil analisa kebutuhan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran yang didukung Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Selain itu, dengan berlakunya Peraturan pemerintah Nomor 28 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, terdapat perubahan susunan dan fungsi organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Malang, termasuk susunan dan fungsi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro juga mengalami perubahan.

Berdasarkan review Rencana Kerja Pemerintah Daerah dan analisa kebutuhan pelaksanaan kinerja pelayanan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan hasil sebagai berikut:

1. Adanya perubahan nomenklatur pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, maka perlu penambahan kegiatan yang berkaitan dengan pengawasan koperasi dan restrukturasi Usaha Koperasi dan Usaha

Mikro Kecil dan menengah, maka perlu diakomodir dalam Rencana Kerja Tahun 2022.

2. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada program Peningkatan Peningkatan Administrasi Perkantoran, Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur, Peningkatan Disiplin Aparatur, Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja Dan Keuangan, Peningkatan Kelembagaan dan Pengawasan Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Produksi Dan Pemasaran Koperasi dan Usaha Mikro, Peningkatan Akses Pembiayaan Koperasi dan Usaha Mikro, dan Pengembangan dan restrukturasi Usaha.
3. Adanya perubahan anggaran hasil analisis kebutuhan, perubahan anggaran tersebut terdapat pada kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat, Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan jasa kebersihan kantor, Penyediaan alat tulis kantor, Penyediaan barang cetakan dan penggandaan, Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan, Penyediaan bahan logistik kantor, Penyediaan Makanan dan Minuman, Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah, Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Dalam Daerah, Pengadaan Kendaraan dinas operasional, Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor, Pengadaan Peralatan Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin / Berkala Gedung Kantor, Pemeliharaan Rutin/ berkala Peralatan kantor, Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu, Pendidikan dan Pelatihan Formal, Penyusunan Pencapaian Laporan kinerja PD, Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun, Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian, Sosialisasi Prinsip-prinsip Pemahaman Perkoperasian, Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro melalui pameran tingkat regional dan nasional, Pengembangan Jaringan Kerjasama, pengembangan informasi bisnis, Koordinasi dan Penguatan akses permodalan Koperasi serta jaringan kerjasama usaha simpan pinjam antar Koperasi, Penataan Manajemen Usaha Simpan pinjam Koperasi dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
4. Beberapa program dan kegiatan masih mendukung pencapaian sasaran sehingga relevan dilaksanakan lagi seperti Program dan

Kegiatan generik yang berkaitan dengan operasional kantor.

5. Adanya tambahan satu program yaitu Pembinaan dan Pelatihan ketrampilan kerja bagi tenaga kerja dan masyarakat, program tersebut dikhususkan untuk dana DBHCHT.
6. Adanya satu Kegiatan yaitu Kegiatan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian yang berasal dari dana DAK.

Uraian hasil Review terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 2.3 berikut ini:

Tabel 2.3

REVIEW TERHADAP RKPD TAHUN 2021

NO	RANCANGAN AWAL					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN					CATATAN PENTING
	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (Rp.)	PROGRAM / KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (Rp.000)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										
2.17	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11,335,721,439	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH				11,335,721,439	
2.17.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	5.882.280.639	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100%	5.882.280.639	
2.17.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang			28.900.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang			28.900.000	

2.17.01.2.01.01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.400.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	2 Dokumen	5.400.000	
2.17.01.2.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	
2.17.01.2.01.03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	
2.17.01.2.01.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	
2.17.01.2.01.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	1 Dokumen	4.200.000	

2.17.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	6.700.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	1 Dokumen	6.700.000	
2.17.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**5.018.210.939**	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**5.018.210.939**	
2.17.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB	4.462.281.900	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB	4.462.281.900	
			Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB				Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	392 OB		
2.17.01.2.02.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	352 OB	543.007.039	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	352 OB	543.007.039	
2.17.01.2.02.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	5.502.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	1 Dokumen	5.502.000	
2.17.01.2.02.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Dokumen	7.420.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	4 Dokumen	7.420.000	

2.17.01.2.05	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**52.079.000**	**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**2.552.079.000**	
2.17.01.2.05.02	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	-	-	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	1 Unit	4.000.000	
2.17.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	49 stel	27.419.000	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	49 stel	27.419.000	
2.17.01.2.05.09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang	24.660.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	10 Orang	24.660.000	
2.17.01.2.05.10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1350 Orang	2.505.000.000	
			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-			Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	49 HOK		
			Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan	-	-			Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi	550 Orang		

			sosialisasi peraturan perundang undangan					peraturan perundang undangan			
			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	-	-			Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	1365 Orang		
2.17.01.2.06	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**212.397.700**	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**212.397.700**	
2.17.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Buah	7.429.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	10 Buah	7.429.000	
2.17.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	28 Buah	27.298.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	28 Buah	27.298.700	
2.17.01.2.06.03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Buah	5.600.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	5 Buah	5.600.000	
2.17.01.2.06.04	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Buah	13.842.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	4 Buah	13.842.000	
2.17.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Buah	28.729.000	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	6 Buah	28.729.000	

2.17.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar	2.424.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	2 Eksemplar	2.424.000	
2.17.01.2.06.08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	624 HOK	21.808.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	624 HOK	21.808.000	
2.17.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	502 HOK	105.267.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	502 HOK	105.267.000	
2.17.01.2.06.11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	-	-	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	1 Aplikasi	20.000.000	
2.17.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**45.827.000**	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**				**45.827.000**	
2.17.01.2.07.02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	25.500.000	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	1 Unit	25.500.000	
2.17.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	4.500.000	Pengadaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah mebel yang diadakan	1 Unit	4.500.000	

2.17.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	-	-	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	1 Unit	2.000.000	
2.17.01.2.07.09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	-	-	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	1 Unit	3.000.000	
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	15.827.000	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	2 Unit	5.827.000	
2.17.01.2.07.10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	-	-	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	1 Unit	5.000.000	
2.17.01.2.08	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**44.564.000**	**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang			**44.564.000**	
2.17.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK	2.964.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	20 OK	2.964.000	
2.17.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening	41.600.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	7 Rekening	24.600.000	

2.17.01.2.08.03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	1 Unit	5.000.000	
2.17.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	-	-	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 OK/OB	12.000.000	
2.17.01.2.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**60.302.000**	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**	**Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang**			**60.302.000**	
2.17.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit	13.700.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	11 Unit	13.700.000	
2.17.01.2.09.05	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah mebel yang dipelihara	-	-	Pemeliharaan Mebel	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah mebel yang dipelihara	1 Unit	3.000.000	
2.17.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	-	-	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	1 Unit	3.000.000	

2.17.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	21 Unit	22.147.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	21 Unit	22.147.000	
2.17.01.2.09.10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	24.455.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	2 Unit	14.455.000	
2.17.01.2.09.11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	-	-	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kab. Malang	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	1 Unit	4.000.000	
2.17.01.2.10	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kab Malang**			**420.000.000**	**Peningkatan Pelayanan BLUD**	**Kab Malang**			**420.000.000**	
2.17.01.2.10.01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	80 KUMKM	420.000.000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Kab Malang	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	80 KUMKM	420.000.000	
2.17.03	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab Malang	**Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi**	**100%**	**100.000.000**	**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**	Kab Malang	**Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi**	**100%**	**220.000.000**	

2.17.03.2.01	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan**	Kab Malang			**100.000.000**	**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan**	Kab Malang			**220.000.000**	
2.17.03.2.01.01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	50 Orang	50.000.000	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	110 Koperasi	110.000.000	
2.17.03.2.01.02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	umlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	50 Orang	50.000.000	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	umlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	110 Koperasi	110.000.000	
2.17.04	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kab Malang	**Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi**		**50.000.000**	**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**	Kab Malang	**Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi**		**122.500.000**	
2.17.04.2.01	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya	Kab Malang			50.000.000	Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya	Kab Malang			122.500.000	

	dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota					
2.17.04.2.01.01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	50 Orang	50.000.000	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Kab Malang	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	125 Koperasi	122.500.000	
2.17.05	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kab Malang**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**		**592.561.000**	**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**	**Kab Malang**	**Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian**		**977.561.000**	
2.17.05.2.01	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Malang			592.561.000	Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Malang			**977.561.000**	
2.17.05.2.01.01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Malang	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	50 Orang	592.561.000	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Malang	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	150 Orang	977.561.000	
			Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	5 Koperasi				Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	5 Koperasi		

			Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	50 Orang				Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi	150 Orang		
	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Malang	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	50 Orang		Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Kab Malang	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	150 Orang		
2.17.06	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kab Malang**	**Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100%**	**142.217.300**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**	**Kab Malang**	**Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi**	**100%**	**815.967.300**	
2.17.06.2.01	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Malang			142.217.300	Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Kab Malang			**815.967.300**	
2.17.06.2.01.01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	50 Anggota Koperasi	142.217.300	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan	Kab Malang	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	200 Anggota Koperasi	815.967.300	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
			Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	50 Anggota Koperasi				Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	200 Anggota Koperasi		
			Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	50 Anggota Koperasi				Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi	200 Anggota Koperasi		
			Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	50 Anggota Koperasi				Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	20 Anggota Koperasi		
2.17.07	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kab Malang**	**Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha**	**100%**	**143.662.500**	**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**	**Kab Malang**	**Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha**	**100%**	**143.662.500**	
2.17.07.2.01	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Kab Malang			143.662.500	Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan,	Kab Malang			143.662.500	

	Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan					
2.17.07.2.01.01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimtek Pengembangan Usaha	25 Usaha Mikro	26.348.000	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimtek Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro	126.348.000	
2.17.07.2.01.02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	25 Usaha Mikro	39.480.000	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	125 Usaha Mikro	139.480.000	
2.17.07.2.01.03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	25 Usaha Mikro	26.761.800	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	125 Usaha Mikro	126.761.800	
2.17.07.2.01.04	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	25 Usaha Mikro	25.329.400	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab Malang	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	125 Usaha Mikro	125.329.400	
2.17.07.2.01.05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	25 Usaha Mikro	25.743.300	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Kab Malang	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	125 Usaha Mikro	125.743.300	
2.17.08	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kab Malang**	**Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan**	**100%**	**4.425.000.000**	**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**	**Kab Malang**	**Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha**	**100%**	**173.750.000**	

			usaha								
2.17.08.2.01	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Kab Malang			**4.425.000.000**	**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**	Kab Malang			**173.750.000**	
2.17.08.2.01.01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Malang	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	4900 Orang	4.425.000.000	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Kab Malang	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	100 Orang	173.750.000	
			Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	2 Pameran				Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	1 Pameran		

2.5. PENELAAHAN USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN MASYARAKAT

Musrenbang Kecamatan yang merupakan forum musyawarah antar para pemangku kepentingan untuk membahas dan menyepakati langkah-langkah penanganan program kegiatan prioritas yang tercantum dalam Daftar Usulan Rencana Kegiatan Pembangunan Desa/Kelurahan yang diintegrasikan dengan prioritas pembangunan daerah kabupaten di wilayah kecamatan telah dilaksanakan dengan baik pada masing-masing wilayah kecamatan.

Dalam urusan bidang koperasi dan usaha mikro, Kecil dan menengah jumlah usulan dari Kecamatan masih sangat besar bila dibandingkan kemungkinan ketersediaan Anggaran. Diakui pula sebagian usulan masih bersifat keinginan belum merupakan kebutuhan prioritas yang didasarkan atas kajian yang komprehensif, selain itu juga untuk membahas dan menetapkan prioritas kegiatan pembangunan di Kabupaten Malang khususnya urusan bidang koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah maka, peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang sangat dibutuhkan sehingga dalam melaksanakan program dan kegiatan menyesuaikan anggaran yang tersedia. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel 2.4 di bawah ini.

Tabel 2.4

Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat dari Pemangku Kepentingan Tahun 2022

NO	Pengusul	Urusan	Usulan	Volume	Permasalahan	Alamat	Catatan
							Catatan
1	SUHARTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Untuk Peningkatan Usaha Mikro	Desa Sukodono, Kab. Malang	
2	H. MOHAMAD SATU	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	5 Orang	Kurangnya Pengetahuan untuk peningkatan kualitas produk usaha	Jl. Raya Jatikerto NO. 61 RT. 018 RW.002 Desa Jatikerto, Kab. Malang	
3	EDIN KRISBINTORO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	meningkatkan jangkauan pemasaran hasil olahan usaha mikro kecil menengah di Desa Jeru	Jl. Kantor RT 06 RW 02, Kab. Malang	
4	BURHANUDDIN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	5 Orang	Masih banyak usaha yang belum berkembang	Desa Talangsuko, Kab. Malang	
5	HERIANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	untuk meningkatkan ekonomi masyarakat dibidang UMKM	Jalan Raya Desa Sidorenggo No.41 Kode Pos 65183, Kab. Malang	
6	SUWANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	5 Orang	Kurang cukupnya kualitas SDM pada koperasi sangat berpengaruh untuk perkembangan koperasi, maka dari itu kami sangat membutuhkan Bimtek kualitas SDM bagi Koperasi	Balai Desa Klepu Rt 01 Rw 01, Kab. Malang	
7	JIRAN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	5 Orang	kurang tersedianya alat dan kemampuan meningkatkan produksi	desa purworejo, Kab. Malang	
8	SIHABUR ROMLI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Wirausaha baru	10 Orang	banyak pengangguran dan untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru serta untuk unit usaha pada bumdes	Desa Karangduren, Kab. Malang	
9	ZA"FARI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Perkoperasian melalui ijin simpan pinjam bagi pengurus dan pengawas KSP / USP Koperasi	5 Orang	membentuk unit simpan pinjam melalui BUMDes	Bumdes Desa Banjararum, Kab. Malang	
10	FARID HARJA	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Desa Purwoasri merupakan pengrajin Mainan Kipas dari kertas dan juga pegrajin keripik samiler. perlunya ada bimbingan dari pihak kabupaten untuk menambah tingkat perekonomian di	Desa Purwoasri, Kab. Malang	

					Desa Kami. kami mengusulkan bimbingan untuk pengembangan usaha mikro karena dengan bimbingan pengembangan ini para pelaku usaha mikro ini bisa mengepakan sayap untuk mengembangkan usaha mereka		
11	ETTI WIDIASTUTI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis perkoperasian bagi pengurus / pengawas KSP/USP	5 Orang	Dengan belum adanya pelatihan untuk kepengrusan koperasi selama ini maka perlu diadakan pelatihan kepengurusan koperasi	Desa Kedok, Kab. Malang	
12	BUDI UTOMO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Fasilitasi permodalan dan jaringan usaha koperasi	5 Orang	Kendala permodalan dalam rangka pengembangan koperasi Desa	Dusun Kalisangkrah Rt 23 Rw 05, Kab. Malang	
13	ASYARUL KHAKIM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Fasilitasi permodalan dan jaringan usaha koperasi	5 Orang	Modal Usaha KOPWAN KRIYA WANODYA	Jl. Tirto Utomo 92, Kab. Malang	
14	ERWIN AKIP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	5 Orang	Masih Kurangnya pengetahuan dari pengurus maupun anggota tentang management dan bidang usaha di koperasi	Jl.Ahmad Yani No.162 Rt.04 Rw.02, Kab. Malang	
15	SUJIANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	banyak masyarakat yang punya usaha mikro tapi kurang berkembang	Desa Sukoraharjo, Kab. Malang	
16	ALI HASAN	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	untuk meningkatkan lapngan kerja dan memberikan pelayanan ekonomi secara luas kepada masyarakat,dan dapat berperan dalam proses pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat, mendorong pertumbuhan ekonomi,dan berperan dalam mewujudkan stabilitas	RT,01 RW,01 Desa Brongkal, Kab. Malang	
17	PRAWOTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Pelatihan UMKM	PARANGARGO, Kab. Malang	
18	H. HAMIM ACHMAD	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	5 Orang	kurangnya pengetahuan tentang bisnis perdagangan online dan pengembangan kapasitas pelaku usaha	sumberpetung, Kab. Malang	
19	H. WAHYUDI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Wirausaha baru	10 Orang	Pelatihan kewirausahaan sangat dibutuhkan untuk Menciptakan kemandirian masyarakat dalam memenuhi kebutuhan, Menciptakan lapangan kerja di desa	Dusun Busu dan Dusun Krajan, Kab. Malang	
20	LUKMAN	Koperasi, Usaha Kecil	Bimbingan Pengembangan Usaha	10 Orang	perijinan,kemasan,proses finising	kantor Desa jl Raya	

	SUYONO	dan Menengah	mikro			Kedungboto Rt 02 Rw 03 Desa Kedungrejo, Kab. Malang	
21	suprapto	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	5 Orang	Pelatihan Peningkatan Kualitas Produk yang ada di desa	Dalisodo, Kab. Malang	
22	H. MISDI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	5 Orang	Kebutuhan Pengetahuan Pengelolaan	Desa Kesamben, Kab. Malang	
23	H. MISDI	Pariwisata	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Kebutuhan Ketrampilan Kerja	Desa Kesamben, Kab. Malang	
24	HASAN ASYARI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	5 Orang	koperasi tidak berkembang	Desa sumbersekar, Kab. Malang	
25	LILIK RAHAYU	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Banyak warga yang masih belum mendapatkan pekerjaan (kurang lebih 30 orang)	Desa Tlogosari, Kab. Malang	
26	AGUS RUDI ISWANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	10 Orang	Dukungan pengembangan umkm di Desa	Dusun Krajan Desa Sidodadi, Kab. Malang	
27	BAMBANG SANTOSO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	5 Orang	Karena di Desa Pagersari sangat minimnya SDM tentang pengelolaan Koperasi sehingga memerlukan Bimbingan Teknis peningkatan kualitas	Desa Pagersari, Kab. Malang	
28	SUDJONO FAKRIM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Wirausaha baru	5 Orang	meningkatkan kapasitas management usaha	desa Karangkates, Kab. Malang	
29	AGUS HARIANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Perkoperasian melalui ijin simpan pinjam bagi pengurus dan pengawas KSP / USP Koperasi	10 Orang	Banyaknya usaha mikro yang masih terkendala dalam pemasaran, kemasan, perijinan, dan standarisasi produk	Balai Desa Talok, Kab. Malang	
30	AGUS HARIANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	5 Orang	Masih banyak usaha mikro yang belum memiliki PIRT	Balai Desa Talok, Kab. Malang	
31	CHOIRUL UMAM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis perkoperasian bagi pengurus / pengawas KSP/USP	5 Orang	Pelatihan dan Pemberdayaan Perempuan untuk managemen Usaha Industri Rumahan	Desa Argosuko, Kab. Malang	
32	SLIMURYANTO	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Fasilitasi permodalan dan jaringan usaha koperasi	10 Orang	Untuk peningkatan mutu dan kesejahteraan masyarakat dan meningkatkan tingkat produksi daerah/desa.	Sukowilangun, Kab. Malang	
33	setyo budi	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis Fasilitasi permodalan dan jaringan usaha koperasi	10 Orang	masih kurangnya pengetahuan tentang usaha mikro desa kami dengan peserta Bimbingan lebih dari 80 orang	Dusun Bayanan, Kab. Malang	
34	H. AMIN AFANDI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Teknis peningkatan kualitas usaha SDM Koperasi	10 Orang	pelatihan ini sebagai wujud dari harpan kami agar umkm di desa ngabab dapat	Dusun Krajan, Kab. Malang	

					berkembang. Umkm desa cenderung kalah di pasar dari segi kemasan dan cara pemasaran. oleh karena itu kami berharap usulan kami dapat terlaksana.		
35	PURWATI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	5 Orang	Bimtek Penguatan Management Usaha dan Daya Saing	Desa Sumberdem, Kab. Malang	
36	ABDUL HALIM	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Permohonan pelatihan dan workshop tentang pemasaran produk UMKM dengan peserta 30 orang pemilik UMKM Desa Bakalan untuk meningkatkan taraf ekonomi desa	Desa Bakalan, Kab. Malang	
37	MUNAKIP	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	Tingginya pengangguran karena pandemi corona	3 Dusun 12 rt, Kab. Malang	
38	ASRI WULANDARI	Pariwisata	Bimbingan Teknis Peningkatan Kualitas Usaha Mikro	10 Orang	Minimnya Ide berwirausaha bagi warga Kelurahan Pagentan	Jl.Sidodadi, Kab. Malang	
39	MUCHAMAD SHARONI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Pelatihan Wirausaha baru	10 Orang	Pengangguran yang meningkat akibat dari pandemi	Rt.015 Rw.005 Dusun Sekarputih, Kab. Malang	
40	MUHAMMAD ISHAK	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	5 Orang	Pengurusan Koperasi Perlu di Tingkatkan kemampuan dalam manajemen usaha dan daya saing produk	Jl.Sultan Hasanudin, Kab. Malang	
41	AHMAD ZAENI	Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	Bimbingan Pengembangan Usaha mikro	10 Orang	kurangnya peningkatan perekonomian pada masyarakat	Kantor Desa Sumberkradenan, Kab. Malang	

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO

3.1. TELAAH TERHADAP KEBIJAKAN NASIONAL

Sebagaimana telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dimana kebijakan Otonomi Daerah dengan memberikan kewenangan yang luas dan nyata serta bertanggungjawab kepada daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Perkembangan Koperasi di era Undang - Undang No. 32 Tahun 2004, dalam kaitannya dengan pelaksanaan Undang - Undang No. 25 Tahun 1992 yang mana selalu dikaitkan dengan kebijakan Pemerintah dengan kebijakan Koperasi dan UMKM yang menjadi primadona kebijakan Presiden terpilih, dan pada kebijakan ini pemerintah berharap dalam mengelola urusan pemeritahan yang menjadi otonominya, daerah tentu membutuhkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana serta biaya. Sebagaimana diketahui kemampuan sumber daya manusia dan kemampuan APBD setiap daerah tidak sama, sehingga dalam mengelola otonomi daerahnya ada keterbatasan dan kendala.

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang salah satu dinas teknis di Kabupaten Malang yang mempunyai tugas pokok dan fungsi Melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bupati Malang sesuai bidang tugasnya dan mengolah data sampai dengan melakukan evaluasi dan monitoring pelaksanaan Kegiatan tetap mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.2. TUJUAN DAN SASARAN RENJA

a. Tujuan

Meningkatnya Jumlah Wirausaha baru mikro dan kecil.

b. Sasaran

Meningkatnya usaha koperasi dan usaha mikro

3.3 PROGRAM DAN KEGIATAN

Dengan melihat Lampiran Tabel 3.1 dapat disimpulkan bahwa rencana Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2022 telah disesuaikan dengan anggaran dengan program, kegiatan dan sub kegiatan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
   a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
      (1) Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
      (2) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD
      (3) Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD
      (4) Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
      (5) Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD
      (6) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
   b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
      (1) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
      (2) Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
      (3) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
      (4) Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD
   c. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
      (1) Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai
      (2) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
      (3) Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian
      (4) Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai
      (5) Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
      (6) Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan
      (7) Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan
   d. Administrasi Umum Perangkat Daerah
      (1) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
      (2) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

(3) Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
(4) Penyediaan Bahan Logistik Kantor
(5) Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
(6) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan
(7) Fasilitasi Kunjungan Tamu
(8) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
(9) Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD

e. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
(1) Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
(2) Pengadaan Mebel
(3) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(4) Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
(5) Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
(6) Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

f. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Penyediaan Jasa Surat Menyurat
(2) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
(3) Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor
(4) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

g. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
(1) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
(2) Pemeliharaan Mebel
(3) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
(4) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
(5) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
(6) Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

h. Peningkatan Pelayanan BLUD

(1) Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD

2. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi

a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota

(1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

(2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi

a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

4. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

(1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi

5. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi

a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

6. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)

a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan

(1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

(2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro

(3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro

(4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro

(5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro

7. Program Pengembangan Umkm

a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil

(1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Instruksi presiden Nomor 9 tahun 2000 tentang pengarusutamaan gender dalam pembangunan nasional mengamanatkan kepada seluruh Menteri, Kepala Lembaga, Gubernur dan Bupati/Walikota untuk mengintegrasikan Pengarusutamaan Gender pada setiap tahapan proses pembangunan, mulai dari perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi seluruh kebijakan, program dan kegiatan nasional, provinsi, dan kabupaten/kota pada semua bidang pembangunan. Dalam rangka mengintegrasikan pengarusutamaan gender dalam proses perencanaan penganggaran. Pada tahun 2003 diterbitkan keputusan menteri dalam negeri nomor 132 tahun 2003 tentang pedoman umum pelaksanaan pengarusutamaan gender dalam pembangunan di daerah. Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah. Peraturan ini menginstruksikan pada semua unit pemerintah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, untuk mengintregasikan pengarusutamaan gender ke dalam perencanaan dan penganggaran. Menurut Permendagri tersebut, penyusunan kebijakan, program dan kegiatan pembangunan berperspektif gender dituangkan dalam RPJMD, Rencana Strategis Perangkat Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Pada tahun 2008 diterbitkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah

sebagimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011, maka dalam Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro tahun akan dituangkan pada 3 program, 3 Kegiatan dan 3 sub Kegiatan yaitu :

1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   a. Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
2. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   a. Kegiatan Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
3. Program Pengembangan Umkm
   a. Kegiatan Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
      (1) Fasilitasi Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Program dan Kegiatan untuk mengatasi dampak pandemi Covid 19 ada 6 program, 6 kegiatan yaitu:

1. Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi
   a. Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota
      (1) Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
      (2) Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang- Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2. Program Penilaian Kesehatan Ksp/Usp Koperasi
   a. Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota

(1) Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota

3. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian
   a. Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi
4. Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi
   a. Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota
      (1) Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota
5. Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)
   a. Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan
      (1) Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
      (2) Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro
      (3) Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro
      (4) Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro
      (5) Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro
6. Program Pengembangan Umkm
   a. Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil
      (1) Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi

Kedua Kegiatan tersebut belum diakomodir dalam Rencana Kerja 2021, dan rencananya akan diusulkan waktu penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2021

Sedangkan Untuk Kegiatan P2kum yang bersumber dana dari Dana Alokasi Khusus (DAK) dilaksanakan pada Program dan kegiatan :

1. Program Pendidikan Dan Latihan Perkoperasian

   (1) Kegiatan Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota

Uraian lebih lanjut Program dan Kegiatan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 3.1 berikut:

Tabel 3.1

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Tahun 2022 dan Perkiraan Maju Tahun 2023

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro

Kode					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2023		
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif (Rp.)
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**															
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**11.335.721.439**					**12.686.721.439**
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8.382.280.639**					**8.983.280.639**
2	**17**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**28.900.000**					**40.900.000**
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	100 %	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	7.400.000

2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	6.200.000
2	17	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	6.200.000
2	17	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	6.200.000
2	17	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Perubahan DPA -SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	6.200.000

2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	8.700.000
2	**17**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5.018.210.939**					**5.236.210.939**
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	392 OB 392 OB	4 Dokumen	100 %	4.462.281.900	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	4.662.281.900
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	352 OB	4 Dokumen	100 %	543.007.039	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	558.007.039
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	100 %	5.502.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	7.502.000

2	17	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	7.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	8.420.000
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**2.552.079.000**					**2.602.079.000**
2	17	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	7 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 stel	7 Dokumen	100 %	17.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	57.419.000
2	17	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000

2	17	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	7 Dokumen	100 %	14.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	19.660.000
2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang- undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1350 Orang 49 HOK 550 Orang 1365 Orang	7 Dokumen	100 %	2.505.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	2.505.000.000

2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 HOK	7 Dokumen	100 %	5.000.000			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	**17**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**212.397.700**					**356.397.700**
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	9 Dokumen	100 %	7.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	10.429.000
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	28 Buah	9 Dokumen	100 %	27.298.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	67.298.700
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Buah	9 Dokumen	100 %	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	8.600.000

2	1 7	0 1	2,0 6	0 4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	4 Buah	9 Doku men	100 %	13.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	18.842.000
2	1 7	0 1	2,0 6	0 5	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	6 Buah	9 Doku men	100 %	28.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	38.729.000
2	1 7	0 1	2,0 6	0 6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang- undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	2 Ekse mplar	9 Doku men	100 %	2.424.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.424.000
2	1 7	0 1	2,0 6	0 8	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamata n, Semua Kelurahan	100 %	624 HOK	9 Doku men	100 %	21.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	51.808.000

2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	502 HOK	9 Dokumen	100 %	85.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	135.267.000
2	17	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Aplikasi	9 Dokumen	100 %	20.000.000			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	20.000.000
2	**17**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**45.827.000**					**125.827.000**
2	17	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	75.500.000
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	14.500.000

2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	17	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	10.000.000
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	5.827.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	15.827.000
2	17	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**44.564.000**					**66.564.000**

2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 OK	4 Dokumen	100 %	2.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	4.964.000
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Rekening	4 Dokumen	100 %	24.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	44.600.000
2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	4 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 OK/OB	4 Dokumen	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	12.000.000
2	**17**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**60.302.000**					**130.302.000**

2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	6 Dokumen	100 %	13.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	33.700.000
2	17	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	5.000.000
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	7.500.000
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	6 Dokumen	100 %	22.147.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	32.147.000

2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	14.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	44.455.000
2	17	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	7.500.000
2	**17**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										**420.000.000**					**425.000.000**
2	17	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Usaha Mikro, kecil,menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 KUM KM	80 KUM KM	100 %	420.000.000			Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	100 %	425.000.000
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										**220.000.000**					**320.000.000**
2	**17**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**										**220.000.000**					**320.000.000**
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100 %	160.000.000

2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	100 %	160.000.000
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										**122.500.000**					**172.500.000**
2	**17**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**122.500.000**					**172.500.000**
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Koperasi	125 Koperasi	0 0	122.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	100 %	172.500.000
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**977.561.000**					**1.077.561.000**
2	**17**	**05**	**2,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**977.561.000**					**1.077.561.000**
2	17	05	2,01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang 5 Koperasi 150 Orang 150 Orang	450 Orang	0 0	977.561.000	Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umu DAK Non Fis Dana Pelayanan Administrasi Kependuduk		Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	100 %	1.077.561.000
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**										**815.967.300**					**1.015.967.300**
2	**17**	**06**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**815.967.300**					**1.015.967.300**

2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Anggota Koperasi 200 Anggota Koperasi 200 Anggota Koperasi 20 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	815.967.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	100 %	1.015.967.300
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**									**643.662.500**					**943.662.500**
2	**17**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**									**643.662.500**					**943.662.500**
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	176.348.000
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	139.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	239.480.000

2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.761.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	176.761.800
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.329.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	175.329.400
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.743.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	100 %	175.743.300
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**173.750.000**					**173.750.000**
2	**17**	**08**	**2,01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**										**173.750.000**					**173.750.000**

2	1 7	0 8	2,0 1	0 1	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang 1 Pameran	100 Orang	0 0	173.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum		Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	100 %	173.750.000
TOTAL															**11.335.721.439**					**12.686.721.439**

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Bahwa Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang tahun 2022 adalah Sumber Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil Cukai dan Tembakau (DBHCT).

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, diharapkan Rencana Anggaran Tahun 2022 dapat mencukupi kebutuhan dan untuk mendukung Program/Kegiatan sebagaimana terlampir pada tabel 4.1

Tabel 4.1
Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2022

No					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Catatan Penting
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
2					**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
2	17				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**11.335.721.439**		
2	17	01			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8.382.280.639**		
2	17	01	2,01		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**28.900.000**		
2	17	01	2,01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	100 %	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen RKA- SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	1 7	01	2,0 1	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 1	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 1	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 1	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**1**	**0**	**2,0**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5.018.210.939**		

	7	**1**	**2**														
2	1 7	01	2,0 2	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	392 OB 392 OB	4 Dokumen	100 %	4.462.281.900	PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum- Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 2	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	352 OB	4 Dokumen	100 %	543.007.039	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 2	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun sesuai aturan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	100 %	5.502.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semes teran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	7.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**2.552.079.000**		
2	17	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	7 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 stel	7 Dokumen	100 %	17.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	7 Dokumen	100 %	14.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1350 Orang 49 HOK 550 Orang 1365 Orang	7 Dokumen	100 %	2.505.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum DBH CHT	
2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 HOK	7 Dokumen	100 %	5.000.000		
2	**17**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**212.397.700**		

2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	9 Dokumen	100 %	7.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	28 Buah	9 Dokumen	100 %	27.298.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Buah	9 Dokumen	100 %	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Buah	9 Dokumen	100 %	13.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Buah	9 Dokumen	100 %	28.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Eksemplar	9 Dokumen	100 %	2.424.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	624 HOK	9 Dokumen	100 %	21.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	502 HOK	9 Dokumen	100 %	85.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Aplikasi	9 Dokumen	100 %	20.000.000		
2	**17**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**45.827.000**		

2	17	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	5.827.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**44.564.000**		

2	1 7	01	2,0 8	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 OK	4 Dokumen	100 %	2.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 8	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Rekening	4 Dokumen	100 %	24.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 8	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	4 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 8	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 OK/OB	4 Dokumen	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi	

						(%)		dan teradministasi dengan benar								Umum	
2	**17**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**60.302.000**		
2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	6 Dokumen	100 %	13.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Keluraha	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000		

						dalam satu tahun (%)		daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar		n							
2	1 7	01	2,0 9	09	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	6 Dokumen	100 %	22.147.000		
2	1 7	01	2,0 9	10	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	14.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	1 7	01	2,0 9	11	Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	

								sesuai aturan dan teradministasi dengan benar									m	
2	**17**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**											**420.000.000**		
2	17	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Usaha Mikro, kecil,menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjamam Dana Bergulir	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 KUMKM	80 KUMKM	100 %	420.000.000		
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**											**220.000.000**		
2	**17**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**											**220.000.000**		
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketangguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										**122.500.000**		
2	**17**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**122.500.000**		
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehatannya	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Koperasi	125 Koperasi	0 0	122.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**977.561.000**		
2	**17**	**05**	**2,01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**977.561.000**		

2	1 7	05	2,0 1	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperasi Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang 5 Koperasi 150 Orang 150 Orang	450 Orang	0 0	977.561.000	Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umu DAK Non Fis Dana Pelayanan Administrasi Kependudu k	r m k- an
2	**1 7**	**0 6**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**										**815.967.300**		
2	**1 7**	**0 6**	**2,0 1**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**815.967.300**		

2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	0Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator bisnis dan teknologi Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Anggota Koperasi 200 Anggota Koperasi 200 Anggota Koperasi 20 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	815.967.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										**643.662.500**		
2	**17**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**										**643.662.500**		
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umu	

								penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan								m	
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	139.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.761.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	

2	1 7	07	2,0 1	04	Pemberdayaa n Kelembagaan Potensi dan Pengembanga n Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.329.400	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	
2	1 7	07	2,0 1	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaa n Usaha Mikro	0Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamat an, Semua Keluraha n	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.743.300	Dana Trans fer Umu m- Dana Aloka si Umu m	
2	**1 7**	**0 8**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**173.750.000**		
2	**1 7**	**0 8**	**2,0 1**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**										**173.750.000**		

2	1 7	08	2,0 1	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang 1 Pameran	100 Orang	0 0	173.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	
														TOTAL	**11.335.721.439**		

Tabel 4.2
Target Kinerja dan Rencana Penyerapan Anggaran Per Triwulan PD 2022

No					Urusan/ Bidang Urusan/ Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan	Indikator Kinerja				Rencana Tahun 2022							Target Kinerja dan Penyerapan Anggaran Per Triwulan (%)								Keterangan
						Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja				Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana	I		II		III		IV		
											Program	Keluaran Sub Kegiatan	Keluaran Kegiatan	Hasil Kegiatan			K	Rp	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
2	**17**				**URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH**										**11.335.721.439**		**10 %**	**1.167.315.650**	**34 %**	**3.853.866.240**	**32 %**	**3.622.395.410**	**24 %**	**2.692.144.140**	
2	**17**	**01**			**PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA**										**8.382.280.639**		**9%**	**790.230.320**	**35 %**	**2.967.834.000**	**30 %**	**2.481.889.715**	**26 %**	**2.142.326.605**	
2	**17**	**01**	**2,01**		**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**										**28.900.000**		**10 %**	**2.890.000**	**40 %**	**11.560.000**	**40 %**	**11.560.000**	**10 %**	**2.890.000**	
2	17	01	2.01	01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja dan Perubahan	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Dokumen	7 Dokumen	100 %	5.400.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	540.000	40 %	2.160.000	40 %	2.160.000	10 %	540.000	

						dalam satu tahun (%)	Rencana strategis dan/atau Rencana Kerja yang disusun tepat waktu																			
2	17	01	2,01	02	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen RKA-SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	420.000	40 %	1.680.000	40 %	1.680.000	10 %	420.000	
2	17	01	2,01	03	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja	Jumlah dokumen Perubahan RKA disusun sesuai ketentuan dan tepat	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	420.000	40 %	1.680.000	40 %	1.680.000	10 %	420.000	

						perangkat daerah dalam satu tahun (%)	waktu	dan tepat waktu																		
2	17	01	2,01	04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	420.000	40 %	1.680.000	40 %	1.680.000	10 %	420.000	
2	17	01	2,01	05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen Perubahan DPA - SKPD disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	4.200.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	420.000	40 %	1.680.000	40 %	1.680.000	10 %	420.000	

2	17	01	2,01	06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja perangkat daerah	Jumlah dokumen perencanaan penganggaran dan evaluasi kinerja yang disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	6.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	670.000	40 %	2.680.000	40 %	2.680.000	10 %	670.000	
2	**17**	**01**	**2,02**		**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**										**5.018.210.939**		**12 %**	**583.272.150**	**38 %**	**1.925.833.320**	**25 %**	**1.256.491.035**	**25 %**	**1.252.614.435**	
2	17	01	2,02	01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah ASN yang menerima gaji dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	392 OB 392 OB	4 Dokumen	100 %	4.462.281.900	PEN DAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	226.443.436	40 %	905.773.742	25 %	566.108.589	25 %	566.108.589	

							Jumlah ASN yang menerima tunjangan dalam satu tahun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	392 OB 392 OB	4 Dokumen	100 %		PENDAPATA ASLI DAERAH (PAD) Dana Transfe Umum- Dana Alokasi Umum	10 %	219.784.754	40 %	879.139.018	25 %	549.461.886	25 %	549.461.886	
2	17	01	2,02	02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai pelaksana kegiatan dalam satu tahun (OB)	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	352 OB	4 Dokumen	100 %	543.007.039	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	25 %	135.751.760	25 %	135.751.760	25 %	135.751.760	25 %	135.751.760	
2	17	01	2,02	05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan	Jumlah dokumen laporan keuangan akhir tahun disusun	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	4 Dokumen	100 %	5.502.000	Dana Transfer Umum- Dana Alokasi Umum	10 %	550.200	40 %	2.200.800	40 %	2.200.800	10 %	550.200	

						penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	sesuai aturan	sesuai aturan dan tepat waktu																	
2	17	01	2,02	07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen laporan keuangan bulanan, triwulanan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan keuangan perangkat daerah disusun sesuai aturan dan tepat waktu	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Dokumen	4 Dokumen	100 %	7.420.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	742.000	40 %	2.968.000	40 %	2.968.000	10 %	742.000	
2	**17**	**01**	**2,05**		**Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah**										**2.552.079.000**		**0,96%**	**24.485.000**	**29,87 %**	**762.264.000**	**39,66 %**	**1.012.264.000**	**29,51 %**	**753.066.000**	
2	17	01	2,05	01	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam	Jumlah sarana prasarana disiplin pegawai yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	7 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	4.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	

						satu tahun (%)		teradministasi dengan benar																	
2	17	01	2,05	02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pakaian dinas dan kelengkapannya yang disediakan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 stel	7 Dokumen	100 %	17.419.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	17.419.000	0%	-	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,05	04	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan pelaksanaan simpeg	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	300.000	40 %	1.200.000	40 %	1.200.000	10 %	300.000	

								benar																	
2	17	01	2,05	05	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah dokumen evaluasi dan penilaian kinerja pegawai	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Dokumen	7 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	300.000	40 %	1.200.000	40 %	1.200.000	10 %	300.000	
2	17	01	2,05	09	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti pendidikan dan pelatihan sesuai tugas dan fungsi	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Orang	7 Dokumen	100 %	14.660.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	1.466.000	40 %	5.864.000	40 %	5.864.000	10 %	1.466.000	

2	17	01	2,05	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Anggota Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1350 Orang	7 Dokumen	100 %	1.000.000.000	DBH CHT	10 %	500.000	40 %	2.000.000	40 %	2.000.000	10 %	500.000	
						Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 HOK	7 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0%	-	30 %	300.000.000	40 %	400.000.000	30 %	300.000.000	

						Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Pengurus/pengawas Koperasi yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	550 Orang	7 Dokumen	100 %	500.000.000	DBH CHT	0%	-	30 %	150.000.000	40 %	200.000.000	30 %	150.000.000	
						Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah UMKM yang diberikan sosialisasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1365 Orang	7 Dokumen	100 %	1.000.000.000	DBH CHT	0%	-	30 %	300.000.000	40 %	400.000.000	30 %	300.000.000	

2	17	01	2,05	11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah pegawai yang mengikuti bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah pemenuhan kinerja pelayanan kepegawaian perangkat daerah yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	49 HOK	7 Dokumen	100 %	5.000.000	DBH CHT	10 %	500.000	40 %	2.000.000	40 %	2.000.000	10 %	500.000	
2	**17**	**01**	**2,06**		**Administrasi Umum Perangkat Daerah**										**212.397.700**		**9%**	**19.239.770**	**46 %**	**96.959.080**	**36 %**	**76.959.080**	**9%**	**19.239.770**	
2	17	01	2,06	01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah komponen instalasi listrik/ penerangan bangunan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	10 Buah	9 Dokumen	100 %	7.429.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	742.900	40 %	2.971.600	40 %	2.971.600	10 %	742.900	

2	17	01	2,06	02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan perlengkapan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	28 Buah	9 Dokumen	100 %	27.298.700	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	2.729.870	40 %	10.919.480	40 %	10.919.480	10 %	2.729.870	
2	17	01	2,06	03	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan rumah tangga yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Buah	9 Dokumen	100 %	5.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	560.000	40 %	2.240.000	40 %	2.240.000	10 %	560.000	

2	17	01	2,06	04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan logistik kantor yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	4 Buah	9 Dokumen	100 %	13.842.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	1.384.200	40 %	5.536.800	40 %	5.536.800	10 %	1.384.200	
2	17	01	2,06	05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	6 Buah	9 Dokumen	100 %	28.729.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	2.872.900	40 %	11.491.600	40 %	11.491.600	10 %	2.872.900	

2	17	01	2,06	06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Eksemplar	9 Dokumen	100 %	2.424.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	242.400	40 %	969.600	40 %	969.600	10 %	242.400	
2	17	01	2,06	08	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah fasilitas kunjungan tamu yang disediakan	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	624 HOK	9 Dokumen	100 %	21.808.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	2.180.800	40 %	8.723.200	40 %	8.723.200	10 %	2.180.800	

2	17	01	2,06	09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rapat koordinasi da konsultasi yang difasilitasi	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	502 HOK	9 Dokumen	100 %	85.267.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	8.526.700	40 %	34.106.800	40 %	34.106.800	10 %	8.526.700	
2	17	01	2,06	11	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sistem pemerintahan berbasis elektronik yang dibangun	Jumlah pelayanan pemenuhan administrasi umum perangkat daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Aplikasi	9 Dokumen	100 %	20.000.000		0%	-	100%	20.000.000	0%	-	0%	-	
2	**17**	**01**	**2,07**		**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**										**45.827.000**		**100**	**45.827.000**	-	-	-	-	-	-	

2	17	01	2,07	02	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah kendaraan dinas operasional/lapangan yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	25.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	25.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,07	05	Pengadaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	4.500.000	0%	-	0%	-	0%	-	

2	17	01	2,07	06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	2.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	2.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,07	09	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor atau bangunan yang dibangun	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	3.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	

2	17	01	2,07	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	5.827.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.827.000	0%	-	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,07	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang diadakan	Jumlah pemenuhan barang milik daerah dalam menunjang operasional kantor disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	100%	5.000.000	0%	-	0%	-	0%	-	
2	**17**	**01**	**2,08**		**Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**44.564.000**		**18%**	**8.146.400**	**32%**	**14.135.600**	**32%**	**14.135.600**	**18%**	**8.146.400**	

2	17	01	2,08	01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pengiriman surat menyurat yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 OK	4 Dokumen	100 %	2.964.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	296.400	40 %	1.185.600	40 %	1.185.600	10 %	296.400	
2	17	01	2,08	02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah rekening jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang dibayarkan dalam 1 tahun	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	7 Rekening	4 Dokumen	100 %	24.600.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	25 %	6.150.000	25 %	6.150.000	25 %	6.150.000	25 %	6.150.000	

2	17	01	2,08	03	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	4 Dokumen	100 %	5.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	500.000	40 %	2.000.000	40 %	2.000.000	10 %	500.000	
2	17	01	2,08	04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Jumlah penyediaan jasa penunjang operasional perkantoran yang disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	12 OK/OB	4 Dokumen	100 %	12.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	1.200.000	40 %	4.800.000	40 %	4.800.000	10 %	1.200.000	
2	**17**	**01**	**2,09**		**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**										**60.302.000**		**2%**	**1.370.000**	**87 %**	**52.082.000**	**9%**	**5.480.000**	**2%**	**1.370.000**	

2	17	01	2,09	01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah jasa pemeliharaan, biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan dalam 1 tahun	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	11 Unit	6 Dokumen	100 %	13.700.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	1.370.000	40 %	5.480.000	40 %	5.480.000	10 %	1.370.000	
2	17	01	2,09	05	Pemeliharaan Mebel	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah mebel yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0%	-	100%	3.000.000	0%	-	0%	-	

2	17	01	2,09	06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	3.000.000		0%	-	100%	3.000.000	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,09	09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	21 Unit	6 Dokumen	100 %	22.147.000		0%	-	100%	22.147.000	0%	-	0%	-	

2	17	01	2,09	10	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	2 Unit	6 Dokumen	100 %	14.455.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0%	-	100%	14.455.000	0%	-	0%	-	
2	17	01	2,09	11	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang dipelihara	Jumlah pemeliharaan barang milik daerah penunjang urusan pemerintahan daerah disusun sesuai aturan dan teradministasi dengan benar	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Unit	6 Dokumen	100 %	4.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	0%	-	100%	4.000.000	0%	-	0%	-	
2	**17**	**01**	**2,10**		**Peningkatan Pelayanan BLUD**										**420.000.000**		**25 %**	**105.000.000**	**25 %**	**105.000.000**	**25 %**	**105.000.000**	**25 %**	**105.000.000**	

2	17	01	2,10	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Persentase pemenuhan dukungan manajemen perkantoran dan penunjang kinerja perangkat daerah dalam satu tahun (%)	Jumlah Usaha Mikro, kecil,menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Jumlah Usaha Mikro, kecil, menengah dan Koperasi yang diberikan pelayanan bantuan pinjaman Dana Bergulir	Persentase Pemenuhan Layanan Internal Perangkat Daerah	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	80 KUMKM	80 KUMKM	100 %	420.000.000		25 %	105.000.000	25 %	105.000.000	25 %	105.000.000	25 %	105.000.000	
2	**17**	**03**			**PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI**										**220.000.000**		**10 %**	**22.000.000**	**30 %**	**66.000.000**	**40 %**	**88.000.000**	**20 %**	**44.000.000**	
2	**17**	**03**	**2,01**		**Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**										**220.000.000**		**10 %**	**22.000.000**	**30 %**	**66.000.000**	**40 %**	**88.000.000**	**20 %**	**44.000.000**	
2	17	03	2,01	01	Pengawasan Kekuatan, Kesehatan, Kemandirian, Ketanggguhan, serta Akuntabilitas Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi dan pengembangan usaha koperasi	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	11.000.000	30 %	33.000.000	40 %	44.000.000	20 %	22.000.000	

								Perundang-Undangan																	
2	17	03	2,01	02	Pemeriksaan Kepatuhan Koperasi terhadap Peraturan Perundang-Undangan Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase pemenuhan pengawasan dan pemeriksaan Koperasi	Jumlah Koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	Jumlah Pemeriksaan Kepatuhan Kelembagaan Koperasi, pengembangan usaha koperasi dan koperasi yang diperiksa terkait kepatuhan Perundang-Undangan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	110 Koperasi	220 Koperasi	0 0	110.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	11.000.000	30 %	33.000.000	40 %	44.000.000	20 %	22.000.000	
2	**17**	**04**			**PROGRAM PENILAIAN KESEHATAN KSP/USP KOPERASI**										**122.500.000**										
2	**17**	**04**	**2,01**		**Penilaian Kesehatan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaanya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota**										**122.500.000**										
2	17	04	2,01	01	Pelaksanaan Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi Kewena	Persentase pemenuhan penilaian kesehatan KSP/USP koperasi	Jumlah Koperasi yang dinilai kesehatannya	Jumlah Koperasi Simpan Pinjam / unit simpan pinjam yang dinilai kesehata	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Koperasi	125 Koperasi	0 0	122.500.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum									

					ngan Kabupaten/Kota			nnya																	
2	**17**	**05**			**PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN**										**977.561.000**		**10 %**	**97.756.100**	**30 %**	**293.268.300**	**40 %**	**391.024.400**	**20 %**	**195.512.200**	
2	**17**	**05**	**2, 01**		**Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**977.561.000**		**10 %**	**97.756.100**	**30 %**	**293.268.300**	**40 %**	**391.024.400**	**20 %**	**195.512.200**	
2	17	05	2, 01	01	Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi	Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah kelompok ekonomi produktif yg diberikan sosialisasi perkoperasian	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	450 Orang	0 0	141.000.000	Dana Transfer Umum	10 %	14.100.000	30 %	42.300.000	40 %	56.400.000	20 %	28.200.000	
						Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah pembinaan Koperasi berprestasi	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	5 Koperasi	450 Orang	0 0	105.551.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	10.555.100	30 %	31.665.300	40 %	42.220.400	20 %	21.110.200	
						Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah peserta pelatihan peningkatan SDM koperas	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoper		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelur	100 %	150 Orang	450 Orang	0 0	140.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	14.000.000	30 %	42.000.000	40 %	56.000.000	20 %	28.000.000	

						Perkoperasian	i	asian		ahan															
						Persentase Koperasi yang Diberikan Pendidikan dan Pelatihan Perkoperasian	Jumlah peserta pelatihan perkoperasian bagi pengurus/pengelola koperasi	Jumlah peserta yang diberikan pendidikan dan pelatihan perkoperasian		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	150 Orang	450 Orang	0 0	591.010.000	Dana Alokasi Khusus	10 %	59.101.000	30 %	177.303.000	40 %	236.404.000	20 %	118.202.000	
2	**17**	**06**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI**										**815.967.300**		**10 %**	**81.596.730**	**30 %**	**244.790.190**	**40 %**	**326.386.920**	**20 %**	**163.193.460**	
2	**17**	**06**	**2,01**		**Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota**										**815.967.300**		**10 %**	**81.596.730**	**30 %**	**244.790.190**	**40 %**	**326.386.920**	**20 %**	**163.193.460**	
2	17	06	2,01	01	Pemberdayaan Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi,	Persentase Koperasi yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	Jumlah Anggota Koperasi dan Usaha Mikro yang ditingkatkan Manajemen Usaha dan daya saing produknya	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	192.118.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	19.211.810	30 %	57.635.430	40 %	76.847.240	20 %	38.423.620	

					dan Restrukturisasi Usaha Koperasi Kewenangan Kabupaten/Kota																				
							Jumlah anggota Koperasi yang difasilitasi akses permodalan dan fasilitasi jaringan kerjasama antar koperasi	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	182.261.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	18.226.110	30 %	54.678.330	40 %	72.904.440	20 %	36.452.220	
							Jumlah Anggota Koperasi yang dikembangkan jenis produknya melalui inkubator	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	200 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	181.623.100	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	18.162.310	30 %	54.486.930	40 %	72.649.240	20 %	36.324.620	

							bisnis dan teknologi																			
							Jumlah Koperasi dan Usaha Mikro yang difasilitasi melalui Promosi dan Pameran tingkat Nasional dan Regional	Jumlah peserta yang diberikan pemberdayaan dan perlindungan koperasi		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	20 Anggota Koperasi	620 Anggota Koperasi	0 0	259.965.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	10 %	25.996.500	30 %	77.989.500	40 %	103.986.000	20 %	51.993.000	
2	**17**	**07**			**PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)**										**643.662.500**		**20 %**	**128.732.500**	**30 %**	**193.098.750**	**35 %**	**225.281.875**	**15 %**	**96.549.375**	
2	**17**	**07**	**2,01**		**Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan**										**643.662.500**		**20 %**	**128.732.500**	**30 %**	**193.098.750**	**35 %**	**225.281.875**	**15 %**	**96.549.375**	
2	17	07	2,01	01	Pendataan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Pendataan potensi UMKM dan Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan,	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.348.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	25.269.600	30 %	37.904.400	35 %	44.221.800	15 %	18.952.200	

								penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan																	
2	17	07	2,01	02	Pemberdayaan melalui Kemitraan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi melalui jaringan usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	139.480.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	27.896.000	30 %	41.844.000	35 %	48.818.000	15 %	20.922.000	

2	17	07	2,01	03	Fasilitasi Kemudahan Perizinan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Legalitas Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	126.761.800	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	25.352.360	30 %	38.028.540	35 %	44.366.630	15 %	19.014.270	
2	17	07	2,01	04	Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah UMKM yang difasilitasi Bimbingan teknis Pengembangan Usaha	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.329.400	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	25.065.880	30 %	37.598.820	35 %	43.865.290	15 %	18.799.410	

								kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan																	
2	17	07	2,01	05	Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pemberdayaan usaha	Jumlah Instansi / Pemangku Kepentingan Pemberdayaan Usaha Mikro yang difasilitasi	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	125 Usaha Mikro	625 Usaha Mikro	0 0	125.743.300	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	25.148.660	30 %	37.722.990	35 %	44.010.155	15 %	18.861.495	
2	**17**	**08**			**PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM**										**173.750.000**		**20 %**	**34.750.000**	**30 %**	**52.125.000**	**35 %**	**60.812.500**	**15 %**	**26.062.500**	
2	**17**	**08**	**2,01**		**Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil**										**173.750.000**		**20 %**	**34.750.000**	**30 %**	**52.125.000**	**35 %**	**60.812.500**	**15 %**	**26.062.500**	

2	17	08	2,01	01	Fasilitasi Usaha Mikro Menjadi Usaha Kecil dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi	Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah orang yang diberikan pembinaan dan pelatihan ketrampilan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha	-	Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	100 Orang	100 Orang	0 0	100.000.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	20.000.000	30 %	30.000.000	35 %	35.000.000	15 %	15.000.000	
						Persentase usaha Mikro yang diberikan fasilitasi pengembangan usaha	Jumlah pameran yang diikuti/diadakan	Jumlah Usaha Mikro yang diberikan fasilitasi peningkatan skala usaha		Kab. Malang, Semua Kecamatan, Semua Kelurahan	100 %	1 Pameran	100 Orang	0 0	73.750.000	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum	20 %	14.750.000	30 %	22.125.000	35 %	25.812.500	15 %	11.062.500	

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang ini, merupakan pedoman dalam melaksanakan program dan kegiatan diharapkan guna mewujudkan pelaksanaan program dan kegiatan sesuai pinsip-prinsip perkoperasian dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pada Tahun 2022 Rencana Kerja ini terdapat 7 (tujuh) program dan 14 (empat belas) kegiatan. Jika dalam proses perkembangan pelaksanaan program/kegiatan terjadi perubahan disebabkan adanya kebijakan-kebijakan baru, kebutuhan atau adanya peraturan-peraturan baru, maka dimungkinkan untuk dilakukan perubahan dengan mekanisme diusulkan kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Rencana Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2022 ini disahkan untuk digunakan sebagai pedoman dalam melaksanakan program/kegiatan selama 1 (satu) tahun, dan sebagai penjabaran dari Rencana Strategis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang serta mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Malang Tahun 2022. Rencana kerja ini sebagai panduan dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kabupaten Malang Tahun 2022 diharapkan manfaat pelaksanaan kegiatan dapat membantu mencukupi kebutuhan sarana dan prasarana koperasi dan usaha mikro, kecil dan menengah di Kabupaten Malang, sehingga berdampak pada kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi masyarakat Kabupaten Malang serta sebagai penunjang pembangunan daerah.

Demikian untuk dilaksanakan.

BUPATI MALANG,

SANUSI